

KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

MINISTRY OF TRADE

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2014

(Audited)



**KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5

Jakarta Pusat 10110

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Perdagangan adalah salah satu entitas pelaporan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Perdagangan. Disamping itu laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, April 2015

Sekretaris Jenderal,



GUNARYO
NIP. 19550910 197501 1 001

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel dan Lampiran	iii
Pernyataan Telah Direviu	vi
Ringkasan	1
Pernyataan Tanggung Jawab	
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	5
III. Catatan atas Laporan Keuangan.....	7
A. Penjelasan Umum	7
A.1. Dasar Hukum	7
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis	7
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	9
A.4. Kebijakan Akuntansi	10
B. Pendekatan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	18
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	18
B.2. Belanja Negara	20
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	26
C.1. Aset Lancar	26
C.2. Aset Tetap	39
C.3. Piutang Jangka Panjang	61
C.4. Aset Lainnya	64
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	73
C.6. Ekuitas Dana Lancar	76
C.7. Ekuitas Dana Investasi	79
D. Pengungkapan Penting Lainnya	81
D.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	81
D.2. Pengungkapan Lain-lain	82

DAFTAR TABEL DAN LAMPIRAN

	Hal
Tabel 1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 dan 2013.....	1
Tabel 2 : Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2014 dan 2013	2
Tabel 3 : Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPA	10
Tabel 4 : Penggolongan Kualitas Piutang	16
Tabel 5 : Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap	17
Tabel 6 : Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	18
Tabel 7 : Perbandingan Realisasi PNBPN TA 2014 dan 2013	19
Tabel 8 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Program TA 2014....	20
Tabel 9 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2014.....	21
Tabel 10 : Perbandingan Realisasi Belanja TA 2014 dan 2013.....	22
Tabel 11 : Perbandingan Belanja Pegawai TA 2014 dan TA 2013	22
Tabel 12 : Perbandingan Belanja Barang TA 2014 dan TA 2013	23
Tabel 13 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2014 dan 2013	24
Tabel 14 : Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2014 dan 2013.....	26
Tabel 15 : Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per Eselon I	26
Tabel 16 : Rincian Setoran Kas di Bendahara Pengeluaran	27
Tabel 17 : Rincian Setoran Kas di Bendahara Pengeluaran Sekretariat Jenderal..	27
Tabel 18 : Rincian Setoran Kas di Bendaharan Pengeluaran Ditjen PDN	28
Tabel 19 : Rincian Setoran Kas di Bendaharan Pengeluaran Ditjen DAGLU	28
Tabel 20 : Rincian Setoran Kas di Bendaharan Pengeluaran Ditjen PEN	29
Tabel 21 : Rincian Setoran Kas di Bendaharan Pengeluaran Ditjen SPK	29
Tabel 22 : Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per Eselon I	29
Tabel 23 : Rincian Setoran Kas di Bendahara Penerimaan	30
Tabel 24 : Rincian Setoran Kas di Bendahara Penerimaan Satuan Kerja	30
Tabel 25 : Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas	30
Tabel 26 : Rincian Penyetoran Kas Lainnya dan Setara Kas	31
Tabel 27 : Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Sekretariat Jenderal	31
Tabel 28 : Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Ditjen PDN	32
Tabel 29 : Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Ditjen KPI	32
Tabel 30 : Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Inspektorat Jenderal	32
Tabel 31 : Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas BPPKP	33
Tabel 32 : Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Ditjen SPK	33
Tabel 33 : Rincian Uang Muka Belanja (<i>Prepayment</i>) per Eselon I	34
Tabel 34 : Rincian Uang Muka Belanja (<i>Prepayment</i>) Sekretariat Jenderal	34
Tabel 35 : Rincian Piutang Bukan Pajak	35

Tabel 36	: Rincian Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak	35
Tabel 37	: Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	36
Tabel 38	: Rincian TP/TGR	36
Tabel 39	: Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	37
Tabel 40	: Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	37
Tabel 41	: Perhitungan Penyisihan TP/TGR	37
Tabel 42	: Rincian Persediaan	38
Tabel 43	: Nilai Persediaan per Eselon I	38
Tabel 44	: Rincian Aset Tetap	39
Tabel 45	: Rincian Tanah per Eselon I	39
Tabel 46	: Rincian Nilai Tanah	40
Tabel 47	: Rincian Peralatan dan Mesin per Eselon I	41
Tabel 48	: Rincian Penambahan Saldo Awal Hasil Inventarisasi	42
Tabel 49	: Rincian Gedung dan Bangunan per Eselon I	50
Tabel 50	: Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan per Eselon I	56
Tabel 51	: Rincian Aset Tetap Lainnya	57
Tabel 52	: Rincian Aset Tetap Lainnya per Eselon I	57
Tabel 53	: Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per Eselon I	59
Tabel 54	: Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	61
Tabel 55	: Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per Eselon I	61
Tabel 56	: Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	62
Tabel 57	: Rincian TP/TGR	62
Tabel 58	: Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	62
Tabel 59	: Rincian Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	63
Tabel 60	: Rincian Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto) per Eselon I	63
Tabel 61	: Rincian Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	63
Tabel 62	: Rincian Aset Lainnya	64
Tabel 63	: Rincian Aset Lainnya per Eselon I	64
Tabel 64	: Rincian Aset Tak Berwujud	65
Tabel 65	: Rincian Aset Tak Berwujud per Eselon I	65
Tabel 66	: Rincian Aset Lain-lain per Eselon I	67
Tabel 67	: Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Asset Lainnya per Eselon I	72
Tabel 68	: Rincian Kewajiban Jangka Pendek	73
Tabel 69	: Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga	73

Tabel 70	: Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per Eselon I	74
Tabel 71	: Rincian Pendapatan Diterima Dimuka	74
Tabel 72	: Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per Eselon I	74
Tabel 73	: Rincian Uang Muka dari KPPN per Eselon I	75
Tabel 74	: Rincian Pendapatan yang Ditangguhkan per Eselon I	75
Tabel 75	: Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per Eselon I	76
Tabel 76	: Rincian Ekuitas Dana Lancar	76
Tabel 77	: Rincian Ekuitas Dana Lancar Per Eselon I.....	76
Tabel 78	: Rincian Cadangan Piutang per Eselon I	77
Tabel 79	: Rincian Cadangan Persediaan per Eselon I	77
Tabel 80	: Rincian Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek per Eselon I	78
Tabel 81	: Rincian Barang/Jasa yang Harus Diterima per Eselon I	78
Tabel 82	: Rincian Barang/Jasa yang Harus Diserahkan per Eselon I	78
Tabel 83	: Rincian Ekuitas Dana Investasi	79
Tabel 84	: Rincian Ekuitas Dana Investasi per Eselon I	79
Tabel 85	: Rincian Diinvestasikan dalam Aset Tetap per Eselon I	80
Tabel 86	: Rincian Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya per Eselon I	80
Lampiran A1	: Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap	
Lampiran A2	: Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual	

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN TAHUN 2014**

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan untuk tahun anggaran 2014 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2014, Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Kementerian Perdagangan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Jakarta, April 2015

Inspektur Jenderal,



Karyanto Suprih
Karyanto Suprih

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2014 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2014 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp100.228.259.690 atau mencapai 826,39 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp12.128.413.000. Realisasi Belanja Negara pada TA 2014 adalah sebesar Rp1.778.927.382.624 atau mencapai 75,53 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp2.355.162.864.000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 dan 2013 dapat disajikan sebagai berikut:

*Tabel 1
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 dan 2013*

Uraian	TA 2014			TA 2013
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi thd Anggaran	Realisasi (Rp)
Pendapatan Negara Dan Hibah	12.128.413.000	100.228.259.690	826,39	68.410.539.906
Belanja Negara	2.355.162.864.000	1.778.927.382.624	75,53	2.702.461.830.133

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Jumlah Aset adalah sebesar Rp4.241.151.134.771 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp47.509.255.763, Aset Tetap sebesar Rp3.784.596.151.441, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp441.963.329, dan Aset Lainnya sebesar Rp408.603.764.238.

Jumlah Kewajiban adalah sebesar Rp16.972.037.926 dimana keseluruhannya merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

Sementara itu jumlah Ekuitas Dana adalah sebesar Rp4.224.179.096.845 yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp30.537.217.837, dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp4.193.641.879.008.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2014 dan 2013

Nama Perkiraan	Tanggal Neraca		Kenaikan/ Penurunan	
	31-12-2014 (Rp)	31-12-2013 (Rp)	(Rp)	%
Aset				
Aset Lancar	47.509.255.763	87.194.464.777	(39.685.209.014)	(45,51)
Aset Tetap	3.784.596.151.441	3.855.263.970.699	(70.667.819.258)	(1,83)
Piutang Jangka Panjang	441.963.329	458.679.329	(16.716.000)	(3,64)
Aset Lainnya	408.603.764.238	207.708.975.167	200.894.789.071	96,72
Jumlah Aset	4.241.151.134.771	4.150.626.089.972	90.525.044.799	2,18
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	16.972.037.926	47.816.331.141	(30.844.293.215)	(64,51)
Jumlah Kewajiban	16.972.037.926	47.816.331.141	(30.844.293.215)	(64,51)
Ekuitas Dana				
Ekuitas Dana Lancar	30.537.217.837	39.378.133.636	(8.840.915.799)	(22,45)
Ekuitas Dana Investasi	4.193.641.879.008	4.063.431.625.195	130.210.253.813	3,20
Jumlah Ekuitas Dana	4.224.179.096.845	4.102.809.758.831	121.369.338.014	2,96
Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas Dana	4.241.151.134.771	4.150.626.089.972	90.525.044.799	2,18

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per tanggal 31 Desember 2014, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 *Audited* sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, April 2015

Menteri Perdagangan,



Rachmat Gobel

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**KEMENTERIAN PERDAGANGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013**

Uraian	Catatan	TA 2014			TA 2013
		Anggaran(Rp)	Realisasi Rp)	% Realisasi thd Anggaran	Realisasi(Rp)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	B.1				
Pendapatan Negara Dan Hibah Transaksi Kas					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	12.128.413.000	100.228.259.690	826,39	68.410.539.906
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH		12.128.413.000	100.228.259.690	826,39	68.410.539.906
BELANJA NEGARA	B.2				
Belanja Negara Transaksi Kas					
Belanja Pegawai	B.2.1	383.545.933.000	330.052.327.789	86,05	261.708.726.215
Belanja Barang	B.2.2	1.414.431.429.000	1.174.311.420.516	83,02	1.588.790.294.477
Belanja Modal	B.2.3	557.185.502.000	274.563.634.319	49,28	832.077.946.674
Belanja Negara Transaksi Non Kas					
Belanja Barang	B.2.2	0	0	0,00	19.884.862.767
JUMLAH BELANJA NEGARA		2.355.162.864.000	1.778.927.382.624	75,53	2.702.461.830.133

**KEMENTERIAN PERDAGANGAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013**

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 DESEMBER 2014 (Rp)	31 DESEMBER 2013 (Rp)
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	4.465.321.851	7.310.288.374
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2	2.660.399.500	2.832.027.845
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3	9.346.196.814	37.335.236.964
Uang Muka Belanja (<i>Prepayment</i>)	C.1.4	22.702.095.861	25.580.678.257
Piutang Bukan Pajak	C.1.5	355.854.995	708.818.565
Penyisihan - Piutang Bukan Pajak	C.1.6	(289.639.740)	(61.958.768)
Piutang Bukan Pajak – Netto		66.215.255	646.859.797
Bagihan Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.7	340.130.256	427.071.208
Penyisihan - Bagihan Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.8	(330.578.256)	(333.761.103)
Bagihan Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi – Netto		9.552.000	93.310.105
Persediaan	C.1.9	8.259.474.482	13.396.063.435
JUMLAH ASET LANCAR		47.509.255.763	87.194.464.777
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1	633.535.700.530	634.471.700.530
Peralatan dan Mesin	C.2.2	725.655.795.497	720.473.649.562
Gedung dan Bangunan	C.2.3	3.108.732.611.878	3.146.299.348.525
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	26.395.033.044	26.248.898.044
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	26.685.579.268	15.310.559.767
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6	65.126.618.092	53.529.288.335
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7	(801.535.186.868)	(741.069.474.064)
JUMLAH ASET TETAP		3.784.596.151.441	3.855.263.970.699
PIUTANG JANGKA PANJANG	C.3		
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.3.1	444.184.250	460.984.250
Penyisihan - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.3.2	(2.220.921)	(2.304.921)
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi – Netto		441.963.329	458.679.329
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		441.963.329	458.679.329
ASET LAINNYA	C.4		
Aset Tak Berwujud	C.4.1	134.018.009.005	128.766.991.539
Aset Lain-lain	C.4.2	346.403.065.984	100.240.988.745
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.3	(71.817.310.751)	(21.299.005.117)
JUMLAH ASET LAINNYA		408.603.764.238	207.708.975.167
JUMLAH ASET		4.241.151.134.771	4.150.626.089.972
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.5		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.1	8.728.950.712	25.847.671.544
Pendapatan Diterima Dimuka	C.5.2	348.778.993	207.709.951
Uang Muka dari KPPN	C.5.3	4.465.321.851	7.310.288.374
Pendapatan Yang Ditangguhkan	C.5.4	3.352.634.370	14.450.661.272
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.5.5	76.352.000	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		16.972.037.926	47.816.331.141
JUMLAH KEWAJIBAN		16.972.037.926	47.816.331.141

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 DESEMBER 2014 (Rp)	31 DESEMBER 2013 (Rp)
EKUITAS DANA			
EKUITAS DANA LANCAR	C.6		
Cadangan Piutang	C.6.1	75.767.255	740.169.902
Cadangan Persediaan	C.6.2	8.259.474.482	13.396.063.435
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	C.6.3	(151.340.768)	(131.068.007)
Barang/Jasa yang Harus Diterima	C.6.4	22.702.095.861	25.580.678.257
Barang/Jasa Yang Harus Diserahkan	C.6.5	(348.778.993)	(207.709.951)
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR		30.537.217.837	39.378.133.636
EKUITAS DANA INVESTASI	C.7		
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	C.7.1	3.784.596.151.441	3.855.263.970.699
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	C.7.2	409.045.727.567	208.167.654.496
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI		4.193.641.879.008	4.063.431.625.195
JUMLAH EKUITAS DANA		4.224.179.096.845	4.102.809.758.831
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		4.241.151.134.771	4.150.626.089.972

III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

A.2. KEBIJAKAN TEKNIS KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Kementerian Perdagangan berkomitmen dengan visi *“Perdagangan sebagai motor penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi serta pencipta kemakmuran rakyat yang berkeadilan.”*

Misi:

1. Meningkatkan kinerja ekspor non-migas secara berkualitas.
2. Menguatkan pasar dalam negeri.
3. Menjaga ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi nasional.
4. Optimalisasi reformasi birokrasi.

Sasaran Strategis:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekspor non migas, sebagai salah satu sumber utama pertumbuhan nasional.

Pada tahun 2014 pertumbuhan ekspor non migas nominal ditargetkan 12,3 – 13,5 persen.

2. Diversifikasi pasar tujuan ekspor.

Pada tahun 2014 rasio konsentrasi penguasaan pangsa pasar 5 negara tujuan ekspor non-migas terbesar (CR5) ditargetkan sebesar 43 – 47 persen.

3. Diversifikasi produk ekspor.

Pada tahun 2014, kontribusi ekspor diluar 10 produk utama 53 – 60 persen.

4. Perbaikan layanan perizinan sektor perdagangan luar negeri.

Pada tahun 2014, jumlah perizinan *online* ditargetkan 70 izin dan waktu pelayanan ditargetkan maksimal 2 hari.

5. Peningkatan keunggulan komparatif produk ekspor non-migas.

Pada tahun 2014, jumlah komoditi dengan RCA > 1 selama 5 tahun berturut-turut ditargetkan sebanyak 590 – 605 komoditi.

6. Perbaikan citra produk ekspor Indonesia.

Pada tahun 2014, skor dimensi ekspor dalam Simon Anholt Nation Brand Index (NBI) ditargetkan sebesar 44 – 49.

7. Peningkatan peran dan kemampuan dalam diplomasi perdagangan Internasional.

Pada tahun 2014, jumlah hasil perundingan perdagangan internasional ditargetkan sebanyak 166.

8. Perbaikan layanan perizinan sektor perdagangan dalam negeri.

Pada tahun 2014, perizinan online ditargetkan berjumlah 17 perizinan dan waktu pelayanan ditargetkan maksimal 5 hari.

9. Peningkatan pertumbuhan PDB sektor perdagangan besar dan eceran.

Pada tahun 2014, pertumbuhan PDB sektor perdagangan besar dan eceran ditargetkan sebesar 4,2 – 5,0 persen.

10. Peningkatan PDB industri kreatif.

Pada tahun 2014, kontribusi PDB Industri kreatif ditargetkan sebesar 8 persen.

11. Peningkatan perlindungan konsumen.

Pada tahun 2014, akumulasi jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang terbentuk setiap tahun ditargetkan sebanyak 60 BPSK.

12. Peningkatan kinerja logistik Indonesia.

Pada tahun 2014, skor *logistic performance index* ditargetkan sebesar 2,76.

13. Penurunan koefisien variasi harga komoditas tertentu.

Pada tahun 2014, rata-rata koefisien variasi harga komoditas tertentu ditargetkan sebesar 5 – 9.

14. Penurunan rasio variasi harga komoditas tertentu di dalam dan luar negeri.

Pada tahun 2014, rata-rata rasio koefisien variasi harga komoditas tertentu di dalam dan luar negeri ditargetkan > 1.

15. Penurunan disparitas harga antar propinsi.

Pada tahun 2014, rata-rata rasio koefisien variasi harga propinsi/nasional ditargetkan sebesar 1,5 – 2,5.

16. Peningkatan Kualitas Kinerja Organisasi.

Opini BPK atas Laporan Keuangan ditargetkan WTP dan Penilaian atas Akuntabilitas kinerja Kementerian mendapatkan kategori B.

17. Penguatan dan Peningkatan kualitas organisasi dan SDM.

Hasil survai atas organisasi yang berbasis kinerja ditargetkan sebesar 2,42 dan peningkatan profesionalisme, kompetensi, dan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab ditargetkan sebesar 1,90.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun 2014 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian Perdagangan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2014 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kementerian Perdagangan seperti eselon I, wilayah, serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah satuan kerja di lingkup Kementerian Perdagangan adalah 171 satker. Dari jumlah tersebut, yang menyampaikan laporan keuangan dan dikonsolidasikan sejumlah 171 satker (100%). Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPA

No	Kode Es I	Uraian	Jumlah Jenis Kewenangan								Jumlah Satker
			KP		KD		DK		TP		
			M	TM	M	TM	M	TM	M	TM	
1	01	Sekretariat Jenderal	32	-	-	-	-	-	-	-	32
2	02	Ditjen PDN	5	-	-	-	33	-	40	-	78
3	03	Ditjen Daglu	6	-	-	-	33	-	-	-	39
4	04	Ditjen KPI	1	-	-	-	-	-	-	-	1
5	05	Inspektorat Jenderal	1	-	-	-	-	-	-	-	1
6	06	Ditjen PEN	4	-	-	-	-	-	-	-	4
7	07	BAPPEBTI	1	-	-	-	-	-	-	-	1
8	08	BPPKP	1	-	-	-	-	-	-	-	1
9	09	Ditjen SPK	11	-	3	-	-	-	-	-	14
Jumlah			62	-	3	-	66	-	40	-	171

Keterangan:
M : Menyampaikan
TM : Tidak Menyampaikan

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2014 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan

kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan adalah sebagai berikut:

*Kebijakan
Akuntansi atas
Pendapatan*

(1) Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan

- Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.
- Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Kebijakan
Akuntansi atas
Belanja*

(2) Kebijakan Akuntansi atas Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.

*Kebijakan
Akuntansi atas
Aset*

(3) Kebijakan Akuntansi atas Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk

sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/Daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban

(4) Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Kebijakan
Akuntansi atas
Ekuitas Dana*

(5) Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas Dana

- Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan *kewajiban* pemerintah.
- Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi.
- Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek.
- Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

*Kebijakan
Akuntansi atas
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih*

(6) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih .

Tabel 4
Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Kebijakan
Akuntansi atas
Penyusutan
Aset Tetap

(7) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

- Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan untuk Aset

Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut tersaji pada Tabel 5.

Tabel 5
Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah
Rp100.228.259.
690

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Kementerian Perdagangan pada TA 2014 adalah sebesar Rp100.228.259.690 atau sebesar 826,39 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp12.128.413.000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah Kementerian Perdagangan adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNBP lainnya sampai dengan tanggal pelaporan tersaji pada Tabel 6.

Tabel 6
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

No	Uraian	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) Serta Pendapatan Dari Penjualan	0	966.394.888	100,00
2	Pendapatan Jasa	11.355.065.000	63.280.690.702	557,29
3	Pendapatan Bunga	0	3.082	100,00
4	Pendapatan Kejaksaaan Dan Peradilan Dan Hasil Tindak Pidana	0	5.273.780	100,00
5	Pendapatan Pendidikan	770.000.000	0	0,00
6	Pendapatan Iuran Dan Denda	0	1.416.970.796	100,00
7	Pendapatan Lain-lain	3.348.000	34.558.926.442	1.032.226,00
	Jumlah	12.128.413.000	100.228.259.690	826,39

Realisasi PNBP lebih tinggi dari Estimasinya disebabkan antara lain:

1. Kenaikan realisasi dari target PNBP tahun 2014 pada BSML Regional I Medan disebabkan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) yang selama ini melakukan pengujian dilaksanakan di Bandung yang membutuhkan biaya-biaya, di mana dengan adanya BSML di Medan biaya transport dari Medan ke Bandung dapat digunakan untuk pelaksanaan pengujian di Medan.
2. Kenaikan realisasi dari target PNBP tahun 2014 pada BSML Regional II Yogyakarta sudah sesuai rencana dan pengujian yang ada di Surabaya sedang tidak aktif (sedang *off*) maka untuk pengujian dilakukan di Yogyakarta dikarenakan BSML Yogyakarta yang terdekat dari Surabaya.
3. Kenaikan realisasi dari target PNBP tahun 2014 pada BSML Regional III Banjarmasin disebabkan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) dari Balikpapan (Kalimantan Timur), Palangkaraya dan Kabupaten/Kota lainnya melakukan verifikasi ke BSML Banjarmasin disebabkan alat media pengujian sudah ada beberapa yang tersedia di Banjarmasin sehingga tidak perlu melakukan pengujiannya ke Direktorat Metrologi Bandung.
4. Kenaikan realisasi dari target PNBP tahun 2014 pada BSML Regional IV Makassar disebabkan banyaknya UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) yang melakukan pengujian di BSML Makasar antara lain:
 - a. PT. Pertamina TBBM Gorontalo;
 - b. PT. Pertamina TBBM Palopo;
 - c. Balai Besar Industri Hasil Perkebunan, Kementerian Perindustrian;

- d. Balai Besar POM Makassar;
 - e. PT. Bahtera Mulya Inti Perkasa, Sulawesi Barat;
 - f. Dinasperindag Kabupaten Banggai;
 - g. UPTD Metrologi Palu, Sulawesi Tengah;
 - h. UPTD Metrologi Papua Barat;
 - i. UPTD Metrologi Kendari, Sulawesi Tenggara;
 - j. UPTD Metrologi Papua;
 - k. UPTD Metrologi Sulawesi Utara;
 - l. UPTD Metrologi Gorontalo;
 - m. Bidang Metrologi P&K Maluku;
 - n. UPTD Metrologi Maluku Utara;
 - o. UPTD Metrologi Sulawesi Selatan;
 - p. UPTD Metrologi Sulawesi Barat.
5. Kenaikan realisasi dari target PNBP tahun 2014 pada PPSDMK, banyaknya peserta diklat yang tertarik untuk ikut diklat di PPSDMK, contohnya peserta diklat yang didaftarkan sebanyak 2 orang, tetapi pada saat pelatihan yang dikirim lebih dari 2 orang.
 6. Kenaikan realisasi dari target PNBP tahun 2014 pada Direktorat Bina Usaha Perdagangan adanya permintaan data dari salah satu perusahaan yaitu PT. Mckinsey Indonesia sebanyak 204 perusahaan dan pada tahun 2014 banyak dari Serikat Pekerja yang meminta data.

Berdasarkan Tabel 7 di bawah ini, Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp31.817.719.784 atau 46,51 persen dibandingkan TA 2013.

Tabel 7
Perbandingan Realisasi PNBP TA 2014 dan 2013

No	Uraian	Realisasi Belanja (Rp)		Kenaikan/ Penurunan	
		2014	2013	(Rp)	%
1	Pendapatan Dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) Serta Pendapatan Dari Penjualan	966.394.888	924.275.483	42.119.405	4,56
2	Pendapatan Jasa	63.280.690.702	62.868.949.126	411.741.576	0,65
3	Pendapatan Bunga	3.082	8.668	(5.586)	(64,44)
4	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana	5.273.780	0	5.273.780	100,00
5	Pendapatan Pendidikan	0	1.324.682.828	(1.324.682.828)	(100,00)
6	Pendapatan Iuran dan Denda	1.416.970.796	374.606.260	1.042.364.536	278,26
7	Pendapatan Lain-lain	34.558.926.442	2.918.017.541	31.640.908.901	1.084,33
	Jumlah	100.228.259.690	68.410.539.906	31.817.719.784	46,51

Pendapatan lain-lain sebesar Rp34.558.926.442 terdiri dari:

1. Penerimaan kembali belanja pegawai pusat tahun anggaran yang lalu sebesar Rp11.874.978.831.

2. Penerimaan kembali belanja lainnya tahun anggaran yang lalu sebesar Rp14.260.537.706.
3. Pendapatan pelunasan piutang non bendahara sebesar Rp30.182.785.
4. Pendapatan pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara (masuk TP/TGR) bendahara sebesar Rp15.749.972.
5. Pendapatan dari untung selisih kurs Uang Persediaan Satker Perwakilan RI sebesar Rp80.027.640.
6. Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji sebesar Rp2.092.336.
7. Pendapatan anggaran lain-lain sebesar Rp8.295.357.172.

Realisasi Belanja
Rp1.778.927.382.
624

B.2. Belanja Negara

Realisasi Belanja Negara Kementerian Perdagangan pada TA 2014 adalah sebesar Rp1.778.927.382.624 atau sebesar 75,53 persen dari anggarannya setelah dikurangi pengembalian belanja. Anggaran Kementerian Perdagangan pada TA 2014 sebesar Rp2.355.162.864.000. Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2014 menurut program tersaji pada Tabel 8.

Tabel 8
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Program TA 2014

Kode	Uraian Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
01.01.01	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan	522.933.385.000	451.577.441.528	86,35
01.01.03	Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan	21.141.021.000	19.799.493.871	93,65
01.01.04	Program Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan	22.522.946.000	20.269.780.214	90,00
01.01.06	Program Pengembangan Ekspor Nasional	32.188.893.000	29.900.537.966	92,89
01.01.07	Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	51.762.207.000	41.432.947.481	80,04
01.01.08	Program Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Internasional	28.797.142.000	27.102.643.900	94,12
01.01.09	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	118.862.660.000	87.409.601.561	73,54
01.01.10	Program Peningkatan Efisiensi Pasar Komoditi	41.263.969.000	32.576.807.067	78,95
01.01.11	Program Peningkatan Perlindungan Konsumen	74.454.822.000	65.497.714.988	87,97
04.01.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan	82.605.590.000	9.803.900.040	11,87

Kode	Uraian Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
04.01.03	Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan	9.579.067.000	8.666.619.358	90,47
04.01.04	Program Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan	30.960.000.000	29.984.652.247	96,85
04.01.06	Program Pengembangan Ekspor Nasional	207.232.968.000	187.701.381.209	90,58
04.01.07	Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	137.867.425.000	130.879.386.856	94,93
04.01.08	Program Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Internasional	67.737.409.000	64.331.978.584	94,97
04.01.09	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	774.501.722.000	455.189.753.701	58,77
04.01.10	Program Peningkatan Efisiensi Pasar Komoditi	25.342.716.000	22.384.682.645	88,33
04.01.11	Program Peningkatan Perlindungan Konsumen	105.408.922.000	94.418.059.408	89,57
	Jumlah	2.355.162.864.000	1.778.927.382.624	75,53

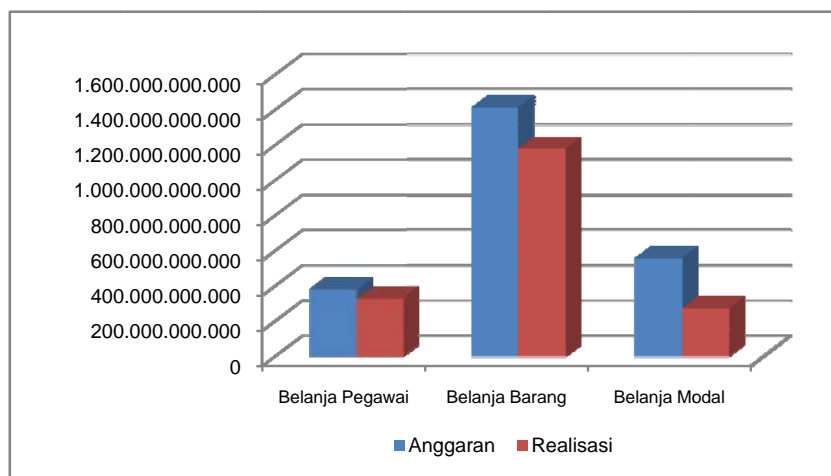
Realisasi Belanja Negara Kementerian Perdagangan sebesar Rp2.355.162.864.000 keseluruhannya merupakan Belanja Transaksi Kas.

Tabel 9
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2014

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
51	Belanja Pegawai	383.545.933.000	330.413.230.657	86,15
52	Belanja Barang	1.414.431.429.000	1.178.170.879.146	83,30
53	Belanja Modal	557.185.502.000	274.563.634.319	49,28
	Realisasi Bruto	2.355.162.864.000	1.783.147.744.122	75,71
	<i>Pengembalian</i>	0	4.220.361.498	100,00
	Realisasi Netto	2.355.162.864.000	1.778.927.382.624	75,53

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam Grafik 1.

Grafik 1
Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2014



Dibandingkan dengan TA 2013, realisasi belanja TA 2014 mengalami penurunan sebesar (34,17) persen. Perbandingan Realisasi Belanja TA 2014 dan 2013 tersaji pada Tabel 10.

Tabel 10
Perbandingan Realisasi Belanja TA 2014 dan 2013

No	Uraian	Realisasi Belanja (Rp)		Kenaikan/ Penurunan	
		2014	2013	(Rp)	%
51	Belanja Pegawai	330.052.327.789	261.708.726.215	68.343.601.574	26,11
52	Belanja Barang	1.174.311.420.516	1.608.675.157.244	(434.363.736.728)	(27,00)
53	Belanja Modal	274.563.634.319	832.077.946.674	(557.514.312.355)	(67,00)
	Jumlah	1.778.927.382.624	2.702.461.830.133	(923.534.447.509)	(34,17)

Belanja Pegawai
Rp330.052.327.
789

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2014 dan TA 2013 adalah masing-masing sebesar Rp330.052.327.789 dan Rp261.708.726.215. Kenaikan sebesar Rp68.343.601.574 atau 26,11 persen. Rincian Belanja Pegawai disajikan dalam Tabel 11.

Tabel 11
Perbandingan Belanja Pegawai TA 2014 dan TA 2013

Uraian	Realisasi Belanja (Rp)		Kenaikan/ Penurunan	
	2014	2013	(Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	219.145.431.135	194.791.948.687	24.353.482.448	12,50
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	161.875.000	157.500.000	4.375.000	2,78
Belanja Honorarium	5.965.780.000	4.418.000.000	1.547.780.000	35,03
Belanja Lembur	5.493.344.226	6.404.586.657	(911.242.431)	(14,23)
Belanja Vakasi	318.786.693	602.852.294	(284.065.601)	(47,12)
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	99.328.013.603	55.794.725.281	43.533.288.322	78,02
Realisasi Bruto	330.413.230.657	262.169.612.919	68.243.617.738	26,03
<i>Pengembalian</i>	<i>360.902.868</i>	<i>460.886.704</i>	<i>(99.983.836)</i>	<i>(21,69)</i>
Realisasi Netto	330.052.327.789	261.708.726.215	68.343.601.574	26,11

Kenaikan Belanja Pegawai sebesar 12,50 persen disebabkan antara lain:

1. Masuknya pegawai baru (CPNS).
2. Adanya kenaikan gaji tahun 2014.
3. Rapel kenaikan gaji tahun 2014 dengan TMT 01 Januari 2015 (\pm 5 bulan).
4. Susulan gaji CPNS (rapel).

Sebab adanya kenaikan Belanja Pegawai Transito (Tunjangan Kinerja) antara lain:

1. Tahun 2013 sebesar Rp55.794.725.281 karena untuk pembayaran tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian Perdagangan selama 6 bulan.

2. Tahun 2014 sebesar Rp99.328.013.603 karena untuk pembayaran tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian Perdagangan selama 13 bulan.

Belanja Barang
Rp1.174.311.420.
516

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2014 dan TA 2013 adalah masing-masing sebesar Rp1.174.311.420.516 dan Rp1.608.675.157.244. Penurunan sebesar Rp434.363.736.728 atau 27,00 persen. Rincian Belanja Barang disajikan dalam Tabel 12.

Tabel 12
Perbandingan Belanja Barang TA 2014 dan TA 2013

Uraian	Realisasi Belanja (Rp)		Kenaikan/ Penurunan	
	2014	2013	(Rp)	%
Belanja Barang Operasional	80.588.938.585	81.327.248.735	(738.310.150)	(0,91)
Belanja Barang Non Operasional	230.521.725.817	328.121.998.593	(97.600.272.776)	(29,75)
Belanja Jasa	425.332.253.395	800.825.374.575	(375.493.121.180)	(46,89)
Belanja Jasa untuk Pencatatan Jasa dari Hibah	0	19.884.862.767	(19.884.862.767)	(100,00)
Belanja Pemeliharaan	52.754.914.465	48.432.787.411	4.322.127.054	8,92
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	289.359.164.190	221.950.299.522	67.408.864.668	30,37
Belanja Perjalanan Luar Negeri	91.594.586.083	91.614.554.841	(19.968.758)	(0,02)
Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	1.941.495.000	10.456.356.000	(8.514.861.000)	(81,43)
Belanja Barang Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk diserahkan kepada pemerintah daerah	1.113.528.111	1.033.658.780	79.869.331	7,73
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	4.964.273.500	9.140.901.000	(4.176.627.500)	(45,69)
Realisasi Bruto	1.178.170.879.146	1.612.788.042.224	(434.617.163.078)	(26,95)
<i>Pengembalian</i>	<i>3.859.458.630</i>	<i>4.112.884.980</i>	<i>(253.426.350)</i>	<i>(6,16)</i>
Realisasi Netto	1.174.311.420.516	1.608.675.157.244	(434.363.736.728)	(27,00)

Penurunan Belanja Barang sebesar 27,00% disebabkan antara lain:

1. Revisi Pagu penghematan yang memakan waktu yang cukup lama sehingga menghambat proses realisasi anggaran belanja barang karena menunggu finalisasi revisi tersebut.
2. Kebijakan MENPAN melalui efisiensi untuk penggunaan anggaran yang menggunakan kegiatan konsinyering khusus di hotel.
3. Padatnya jadwal pelaksanaan kegiatan pada tahun 2014 bersamaan dengan kegiatan Kementerian yang prioritas dan cenderung tentatif menyebabkan sejumlah kegiatan penyesuaian dengan perencanaan yang telah dibuat.

4. Belanja keperluan perkantoran tidak mencapai target karena anggaran kenaikan honorarium belum ada persetujuan dari Kementerian Keuangan.
5. Pada tahun anggaran 2013 Kementerian Perdagangan cq Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional mendapat kesempatan menjadi penyelenggara Konferensi Tingkat Menteri *World Trade Organization* (WTO) ke-9 diselenggarakan di Nusa Dua Bali pada tanggal 3-7 Desember 2013.
6. Pada tahun 2014 terdapat pengurangan kegiatan jasa konsultasi khususnya di Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
7. Pada tahun 2014 belanja iklan untuk kegiatan kampanye *Nation Branding* di media-media TV Internasional seperti CNN, CNBC, BBC dan Bloomberg pada unit Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional mengalami penurunan.

Belanja Barang sebesar Rp1.174.311.420.516 terdiri dari:

1. Rupiah Murni sebesar Rp1.172.745.305.625
2. Pinjaman dan Hibah sebesar Rp1.566.114.891.

Pinjaman dan Hibah sebesar Rp1.566.114.891 merupakan realisasi proyek Trade Support Programme II (TSP II) – Uni Eropa dari anggaran sebesar Rp2.200.000.000 pada unit Direktorat Standardisasi.

Belanja Modal
Rp274.563.634.
319

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2014 dan TA 2013 adalah masing-masing sebesar Rp274.563.634.319 dan Rp832.077.946.674. Penurunan sebesar Rp557.514.312.355 atau 67,00 persen. Rincian Belanja Modal disajikan dalam Tabel 13.

Tabel 13
Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2014 dan 2013

Uraian	Realisasi Belanja (Rp)		Kenaikan/Penurunan	
	2014	2013	(Rp)	%
Belanja Modal Tanah	0	24.097.790.000	(24.097.790.000)	(100,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.944.779.398	46.463.955.870	(15.519.176.472)	(33,40)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	232.897.090.512	742.936.496.161	(510.039.405.649)	(68,65)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	69.006.300	478.145.000	(409.138.700)	(85,57)
Belanja Modal Lainnya	10.652.758.109	18.183.637.188	(7.530.879.079)	(41,42)
Realisasi Bruto	274.563.634.319	832.160.024.219	(557.596.389.900)	(67,01)
<i>Pengembalian</i>	0	82.077.545	(82.077.545)	(100,00)
Realisasi Netto	274.563.634.319	832.077.946.674	(557.514.312.355)	(67,00)

Penurunan Belanja Modal sebesar 67,00 persen disebabkan antara lain:

1. Pengadaan tanah Kemendag sebesar Rp72.400.000.000 tidak mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Anggaran sesuai surat No. S-2585/AG/2014 tanggal 24 Desember 2014 walaupun persyaratan untuk proses pencairan telah dipenuhi oleh Kementerian Perdagangan. Selain itu, sesuai surat Menteri Keuangan No. S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga.
2. Kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan diblokir sebesar Rp82.000.000.000 untuk 13 daerah pembangunan fisik pasar sebelum DIPA terbit, dan terdapat 20 satuan kerja tugas pembantuan menyatakan tidak sanggup melaksanakan pekerjaan pembangunan fisik pasar setelah DIPA petikan terbit dengan nilai total sebesar Rp120.000.000.000.
3. Keperluan belanja modal sudah terealisasi dan sisa dana merupakan efisiensi anggaran.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar

Rp47.509.255.763

C.1. Aset Lancar

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp47.509.255.763 dan Rp87.194.464.777.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Kementerian Perdagangan per 31 Desember 2014 dan 2013 tersaji pada Tabel 14.

Tabel 14
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2014 dan 2013

No	Uraian	31-12-2014 (Rp)	31-12-2013 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	4.465.321.851	7.310.288.374	(2.844.966.523)	(38,92)
2	Kas di Bendahara Penerimaan	2.660.399.500	2.832.027.845	(171.628.345)	(6,06)
3	Kas Lainnya dan Setara Kas	9.346.196.814	37.335.236.964	(27.989.040.150)	(74,97)
4	Uang Muka Belanja (<i>Prepayment</i>)	22.702.095.861	25.580.678.257	(2.878.582.396)	(11,25)
5	Persediaan	8.259.474.482	13.396.063.435	(5.136.588.953)	(38,34)
6	Piutang Bukan Pajak (Netto)	66.215.255	646.859.797	(580.644.542)	(89,76)
7	Bagihan Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	9.552.000	93.310.105	(83.758.105)	(89,76)
	Jumlah	47.509.255.763	87.194.464.777	(39.685.209.014)	(45,51)

Kas di Bendahara

Pengeluaran

Rp4.465.321.851

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp4.465.321.851 dan Rp7.310.288.374 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per Eselon I tersaji pada Tabel 15.

Tabel 15
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per Eselon I

No	Uraian	31-12-2014 (Rp)	31-12-2013 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	SETJEN	2.713.408.944	3.925.508.816	(1.212.099.872)	(30,88)
2	DITJEN PDN	804.741.524	1.015.692.111	(210.950.587)	(20,77)
3	DITJEN DAGLU	90.232.277	9.399.500	80.832.777	859,97
4	DITJEN PEN	742.440.606	1.894.781.783	(1.152.341.177)	(60,82)
5	DITJEN SPK	114.498.500	464.906.164	(350.407.664)	(75,37)
	Jumlah	4.465.321.851	7.310.288.374	(2.844.966.523)	(38,92)

Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut disetor ke rekening Kas Negara sebesar Rp1.219.459.527 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 16
Rincian Setoran Kas di Bendahara Pengeluaran

No	Uraian	Saldo Per 31 Des 2014	Penyetoran	Saldo
1	SETJEN	2.713.408.944	324.485.726	2.388.923.218
2	DITJEN PDN	804.741.524	804.741.524	-
3	DITJEN DAGLU	90.232.277	90.232.277	-
4	DITJEN PEN	742.440.606	-	742.440.606
5	DITJEN SPK	114.498.500	-	114.498.500
	Jumlah	4.465.321.851	1.219.459.527	3.245.862.324

Rincian penyetoran Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar **Rp1.219.459.527** tersebut sampai dengan tanggal 30 April 2015 ke rekening Kas Negara sebagai berikut:

A. SEKRETARIAT JENDERAL

Tabel 17
Rincian Setoran Kas di Bendahara Pengeluaran Sekretariat Jenderal

Satuan Kerja	31-12-2014 (Rp)	Penyetoran	NTPN	Tgl Setor	Saldo
Pusdiklat	500	500	0504090604081107	14-01-2015	-
Atdag Washington	20.667.994				20.667.994
Atdag Ottawa	169.915.726	169.915.726	1108150600111301	13-01-2015	-
Atdag Moscow	119.400.211				119.400.211
Atdag Roma	163.016.473	154.459.048	0302050010130812	06-01-2015	8.557.425
Atdag London	458.766.399				458.766.399
Atdag Brussel	340.888				340.888
Atdag Den Haag	434.710.138				434.710.138
Atdag Berlin	119.759.823				119.759.823
Atdag Jenewa	1.701.465				1.701.465
ITN Jenewa	137.016.104				137.016.104
Atdag Paris	70.520.813				70.520.813
Atdag Madrid	110.758.259				110.758.259
Atdag New Delhi	27.119.032				27.119.032
Atdag Tokyo	178.033.818				178.033.818
Atdag Seoul	108.212.347				108.212.347
Atdag Beijing	(400.285)				(400.285)
Konsuldag Hongkong	21.200.036				21.200.036
Atdag Canberra	202.674.419				202.674.419
Atdag Bangkok	16.046.902	110.452	1110150706020503	13-01-2015	15.936.450
Atdag Kualalumpur	67.481.844				67.481.844
Atdag Singapura	63.616.540				63.616.540
Atdag Manila	17.892.188				17.892.188
Atdag Riyadh	203.921.757				203.921.757
Atdag Cairo	1.035.553				1.035.553
Jumlah	2.713.408.944	324.485.726			2.388.923.218

Catatan:

1. Uang Persediaan dengan saldo negatif pada Satker Atdag Beijing sebesar (Rp400.285) merupakan selisih akibat selisih kurs yang akan diperhitungkan di TA.2015 sebagai pendapatan dari selisih kurs.

2. Terdapat saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp2.388.923.218 pada satker-satker perwakilan luar negeri yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 tidak/belum menyetorkan sisa dana UP, maka sisa dana UP tersebut akan diperhitungkan pada saat pengajuan SPM-UP tahun anggaran 2015 sebagaimana telah diatur dalam Pasal 41 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: PER-37/PB/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir Tahun Anggaran 2014.

B. DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Tabel 18
Rincian Setoran Kas di Bendahara Pengeluaran Ditjen PDN

Satuan Kerja	31-12-2014 (Rp)	Penyetoran	NTPN	Tgl Setor	Saldo
Disperindag Kab. Labuhan Batu Utara	30.460.000	30.460.000	09010900206050208	02-01-2015	-
Disperindag Kab. Muara Enim	15.285.950	15.285.950	0313021012060203	08-01-2015	-
Disperindag Kab. Seram Bagian Timur	498.000	498.000	0510100913070709	05-01-2015	-
Dit. Bahan Pokok	249.526.896	120.149.581	0007050211070907	06-01-2015	-
		600	0404100809110207	06-01-2015	-
		129.376.715	0415131101091109	06-01-2015	-
Set. Ditjen PDN	123.669.830	123.669.830	0103061210111108	08-01-2015	-
Dit. Logistik	20.050	20.050	0601070501140808	02-01-2015	-
Dit. Binus	317.195.798	317.195.798	0302011212150609	07-01-2015	-
Prov. DKI Jakarta	16.050.000	16.050.000	E9DFDON9TGA578LN	16-01-2015	-
Prov. Jawa Timur	9.510.000	9.510.000	1302071403130307	16-01-2015	-
Kab. Pangkajene Kepulauan	175.000	175.000	1315131112040104	07-01-2015	-
Kab. Buru Selatan	42.350.000	42.350.000	0915070504150508	16-01-2015	-
Jumlah	804.741.524	804.741.524			-

C. DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Tabel 19
Rincian Setoran Kas di Bendahara Pengeluaran Ditjen DAGLU

Satuan Kerja	31-12-2014 (Rp)	Penyetoran	NTPN	Tgl Setor	Saldo
Dit. Fasilitas	67.666.277	67.666.277	9121206100004	08-01-2015	-
Prov. Papua Barat	22.566.000	22.566.000	1303080900010510	14-01-2015	-
Jumlah	90.232.277	90.232.277			-

D. DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL

Tabel 20
Rincian Setoran Kas di Bendahara Pengeluaran Ditjen PEN

Satuan Kerja	31-12-2014 (Rp)	Penyetoran	NTPN	Tgl Setor	Saldo
Set. Ditjen PEN	742.440.606	-	-	-	742.440.606
Jumlah	742.440.606				742.440.606

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp742.440.606 akan diperhitungkan untuk UP tahun 2015.

E. DIREKTORAT JENDERAL STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Tabel 21
Rincian Setoran Kas di Bendahara Pengeluaran Ditjen SPK

Satuan Kerja	31-12-2014 (Rp)	Penyetoran	NTPN	Tgl Setor	Saldo
Prov. Riau (099025)	114.498.500	-	-	-	114.498.500
Jumlah	114.498.500	-	-	-	114.498.500

Sampai dengan tanggal pelaporan belum diperoleh Surat Setoran Bukan Pajak atas saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Dekonsentrasi Provinsi Riau.

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp2.660.399.500

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp2.660.399.500 dan Rp2.832.027.845 yang mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan lingkup per Eselon I tersaji pada Tabel 22.

Tabel 22
Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per Eselon I

No	Uraian	31-12-2014 (Rp)	31-12-2013 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	SETJEN	2.608.883.134	2.818.252.845	(209.369.711)	(7,43)
2	DITJEN PDN	7.535.000	0	7.535.000	100,00
3	DITJEN DAGLU	0	12.385.000	(12.385.000)	(100,00)
4	DITJEN SPK	43.981.366	1.390.000	42.591.366	3.064,13
	Jumlah	2.660.399.500	2.832.027.845	(171.628.345)	(6,06)

Kas di Bendahara Penerimaan tersebut keseluruhannya telah disetor ke rekening Kas Negara dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 23
Rincian Setoran Kas di Bendahara Penerimaan

No	Eselon I	Satker	Saldo 31-12-2014	Penyetoran	Saldo
1	SETJEN	KDEI	2.608.883.134	2.608.883.135	(1)
2	DITJEN PDN	Dit. Binus	7.535.000	7.535.000	-
3	DITJEN SPK	BPMBEI	43.256.366	43.256.366	-
		Kalibrasi	725.000	725.000	-
Jumlah			2.660.399.500	2.660.399.501	(1)

Rincian penyetoran Kas di Bendahara Penerimaan tersebut sampai dengan tanggal 30 April 2015 ke rekening Kas Negara sebagai berikut:

Tabel 24
Rincian Setoran Kas di Bendahara Penerimaan Satuan Kerja

No	Satker	Jumlah Disetor	NTPN	Nilai	Tgl. Setor
1	KDEI	2.608.883.135	0615080708140911	2.139.105	08-01-2015
			0906130703090108	2.112.697.423	08-01-2015
			1405141112091506	494.046.607	08-01-2015
2	Dit. Binus	7.535.000	DA0223JF96AMMH48	7.535.000	08-04-2015
3	BPMBEI	43.256.366	0406150307111206	43.256.366	02-01-2015
3	Kalibrasi	725.000	0202151306130511	725.000	02-01-2015
Jumlah		2.660.399.500		2.660.399.501	

Catatan:

Satker KDEI telah menyetor sebesar Rp2.608.883.135, jumlah yang harus disetor adalah sebesar Rp2.608.883.134, sehingga terdapat kelebihan penyetoran sebesar Rp1.

Kas Lainnya dan Setara Kas
Rp9.346.196.814

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp9.346.196.814 dan Rp37.335.236.964 yang merupakan kas berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas tersaji pada Tabel 25.

Tabel 25
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

No	Uraian	31-12-2014 (Rp)	31-12-2013 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	SETJEN	8.467.739.442	33.199.765.571	(24.732.026.129)	(74,49)
2	DITJEN PDN	44.152.700	157.079.969	(112.927.269)	(71,89)
3	DITJEN DAGLU	0	25.415.000	(25.415.000)	(100,00)
4	DITJEN KPI	76.352.000	2.753.115.000	(2.676.763.000)	(97,23)
5	ITJEN	35.922.550	58.005.011	(22.082.461)	(38,07)
6	BPPKP	71.378.500	1.059.229.641	(987.851.141)	(93,26)
7	DITJEN SPK	650.651.622	82.626.772	568.024.850	687,46
Jumlah		9.346.196.814	37.335.236.964	(27.989.040.150)	(74,97)

Rincian penyetoran Kas Lainnya dan Setara Kas tersebut sampai dengan tanggal 30 April 2015 ke rekening Kas Negara sebagai berikut:

Tabel 26
Rincian Penyetoran Kas Lainnya dan Setara Kas

No	Uraian	Saldo Per 31 Des 2014	Penyetoran/ Pembayaran	Saldo
1	SETJEN	8.467.739.442	8.467.739.442	-
2	DITJEN PDN	44.152.700	44.152.700	-
3	DITJEN KPI	76.352.000	76.352.000	-
4	ITJEN	35.922.550	35.922.550	-
5	BPPKP	71.378.500	71.378.500	-
6	DITJEN SPK	650.651.622	650.615.150	36.472
Jumlah		9.346.196.814	9.346.160.342	36.472

Rincian setoran Kas Lainnya dan Setara Kas tersebut adalah sebagai berikut:

A. SEKRETARIAT JENDERAL

Tabel 27
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Sekretariat Jenderal

Satuan Kerja	31-12-2014 (Rp)	Penyetoran/ Pembayaran	NTPN	Tgl Setor	Saldo
Sekretariat Jenderal (Setjen Biro-Biro)	378.616.646	378.616.646	0803110713030806	27-01-2015	-
	303.266.002	109.763.194	0612090904111512	27-01-2015	-
		130.131.755	0412150614000105	27-01-2015	-
		11.436.551	1102120713090903	27-01-2015	-
		51.934.502	0704120011010007	27-01-2015	-
7.765.607.294	7.765.607.294	-	-	-	
Biro Umum	14.001.800	14.001.800	-	-	-
PPSDMK	6.247.700	6.247.700	1109030501121513	13-01-2014	-
Jumlah	8.467.739.442	8.467.739.442			-

Catatan:

1. Tahun 2014 pada Satuan Kerja Sekretariat Jenderal (Setjen Biro-Biro) terdapat tunjangan kinerja sebesar Rp8.447.489.942, yang terdapat pada akun Kas Lainnya dan Setara Kas dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Tunjangan Kinerja Desember 2014 belum dibayar	7.765.607.294
2	Pengembalian Tunjangan Kinerja belum disetor ke Kas Negara	681.882.648
Jumlah		8.447.489.942

2. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas satker Biro Umum senilai Rp14.001.800 merupakan uang makan yang belum dibayarkan per 31 Desember 2014.

B. DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Tabel 28
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Ditjen PDN

Satuan Kerja	31-12-2014 (Rp)	Penyetoran/Pembayaran	NTPN	Tgl Setor	Saldo
Set. Ditjen PDN	43.476.850	6.250.000	1508011100010108	08-01-2015	-
		37.226.850	0110101213121407	08-01-2015	-
Disperindag Kab. Labuhan Batu Utara	675.850	675.850	0401060906030911	02-01-2015	-
Jumlah	44.152.700	44.152.700			-

C. DIREKTORAT JENDERAL KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Tabel 29
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Ditjen KPI

Satuan Kerja	31-12-2014 (Rp)	Penyetoran/Pembayaran	NTPN	Tgl Setor	Saldo
KPI	76.352.000	76.352.000	-	-	-
Jumlah	76.352.000				-

Kas Lainnya dan Setara Kas senilai Rp76.352.000 pada Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional merupakan pajak yang belum disetorkan per 31 Desember 2014.

D. INSPEKTORAT JENDERAL

Tabel 30
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Inspektorat Jenderal

Satuan Kerja	31-12-2014 (Rp)	Penyetoran/Pembayaran	NTPN	Tgl Setor	Saldo
Inspektorat Jenderal	26.102.550	1.260.000	1504011212110105	06-01-2015	-
		2.100.000	0110000313061505	06-01-2015	-
		6.300.000	1209060602130603	06-01-2015	-
		1.680.000	0806140700030400	06-01-2015	-
		1.260.000	1403011107001202	06-01-2015	-
		840.000	0102110203010607	06-01-2015	-
		630.000	1303131010091509	06-01-2015	-
		452.400	1009141303050602	19-01-2015	-
		556.000	0315030612050411	19-01-2015	-
		30.400	1209111115061408	19-01-2015	-
		789.800	0605090702100805	19-01-2015	-
		564.200	0709071312110807	19-01-2015	-
		212.100	0711051108111205	19-01-2015	-
		160.800	1213140000141304	19-01-2015	-
		329.600	1102090809111006	19-01-2015	-
		91.800	0503041011020211	19-01-2015	-
		1.583.650	1404090503140008	19-01-2015	-
		1.068.600	0912050505010104	19-01-2015	-
		690.000	0405110911120801	19-01-2015	-
		921.000	0606090811110912	19-01-2015	-
149.400	0108091107050009	19-01-2015	-		

Satuan Kerja	31-12-2014 (Rp)	Penyetoran/Pembayaran	NTPN	Tgl Setor	Saldo
		30.000	0907151207071306	19-01-2015	-
		715.000	1211051208081211	19-01-2015	-
		494.400	0108051200020105	19-01-2015	-
		77.600	0910020101131009	19-01-2015	-
		2.363.400	0211081201090001	22-01-2015	-
		208.000	0905111206070900	22-01-2015	-
		544.400	0902000403150505	22-01-2015	-
Inspektorat Jenderal	9.820.000	-	-	-	-
Jumlah	35.922.550	26.102.550			-

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas senilai Rp9.820.000 adalah untuk pembayaran Honorarium Staff Ahli di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan bulan September, Oktober, November dan Desember 2014 masing-masing senilai Rp2.455.000.

E. BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Tabel 31
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas BPPKP

Satuan Kerja	31-12-2014 (Rp)	Penyetoran/Pembayaran	NTPN	Tgl Setor	Saldo
BPPKP	71.378.500	12.088.050	0505140409080713	16-01-2015	-
		59.290.450		Jan 2015	-
Jumlah	71.378.500	71.378.500			-

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas pada Neraca per 31 Desember 2014 sebesar Rp71.378.500 merupakan belanja uang makan pegawai bulan Desember 2014 sebesar Rp59.290.450 dan pengembalian belanja uang makan pegawai bulan Desember 2014 sebesar Rp12.088.050 yang baru disetor ke kas negara pada tanggal 16 Januari 2015 dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) 0505 1404 09 08 0713.

F. DIREKTORAT JENDERAL STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Tabel 32
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Ditjen SPK

Satuan Kerja	31-12-2014 (Rp)	Penyetoran/Pembayaran	NTPN	Tgl Setor	Saldo
Set. Ditjen SPK	617.854.000	617.854.000			-
Ditmet	32.761.150	32.761.150	0712050211090704	14-01-2015	-
Prov. Jawa Timur	36.472	-	-	-	36.472
Jumlah	650.651.622	650.615.150			36.472

Terdapat biaya-biaya dan honor pegawai yang belum dibayarkan sebesar Rp617.854.000 pada satuan kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen per 31 Desember 2014.

Uang Muka Belanja
(Prepayment)
Rp22.702.095.861

C.1.4. Uang Muka Belanja (Prepayment)

Saldo Uang Muka Belanja (Prepayment) per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp22.702.095.861 dan Rp25.580.678.257. Rincian Uang Muka Belanja (Prepayment) tersaji pada Tabel 33.

Tabel 33
Rincian Uang Muka Belanja (Prepayment) per Eselon I

No	Uraian	31-12-2014 (Rp)	31-12-2013 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	SETJEN	20.508.017.643	24.199.830.000	(3.691.812.357)	(15,26)
2	DITJEN PEN	2.194.078.218	1.380.848.257	813.229.961	58,89
	Jumlah	22.702.095.861	25.580.678.257	(2.878.582.396)	(11,25)

Penjelasan Uang Muka Belanja sebagai berikut:

1. SEKRETARIAT JENDERAL

Uang Muka Belanja pada Sekretariat Jenderal merupakan uang muka belanja pada Satuan Kerja KDEI.

KDEI Taipei menyewa Gedung milik **Sunrise Printing Co. Ltd** seluas 490.64 Ping atau kurang lebih 1.472 m² di Lantai 6 *Twin Head Building, Ruiguang Road No.550, Neihu Distrik Taipei City* termasuk tujuh tempat parkir mobil di lantai B4 dan satu tempat parkir VIP di B1, penggunaan delapan buah lift, dan security 24 jam selama 15 tahun dari tahun 2005 hingga tahun 2019. Nilai Uang Muka Belanja per 31 Desember 2014 sebesar Rp20.508.017.643 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 34
Rincian Uang Muka Belanja (Prepayment) Sekretariat Jenderal

Keterangan	Periode	NTS	Kurs	Eq Rupiah
Sewa dibayar dimuka	2014-2019	86.526.000	279,6828	24.199.830.000
Amortisasi sewa dimuka	2014			3.691.812.357
Sewa dibayar dimuka per 31 Desember 2014				20.508.017.643

2. DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL

Uang muka belanja pada satker Ditjen PEN senilai **Rp2.194.078.218** tersebut merupakan sewa dibayar dimuka atas biaya sewa gedung kantor *Indonesia Trade Promotion Center (ITPC)*.

Piutang Bukan Pajak
Rp355.854.995

C.1.5. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp355.854.995 dan Rp708.818.565 yang merupakan semua hak atau klaim pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran. Rincian Piutang Bukan Pajak tersaji pada Tabel 35.

Tabel 35
Rincian Piutang Bukan Pajak

No	Uraian	31-12-2014 (Rp)	31-12-2013 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	DITJEN PDN	0	485.213.565	(485.213.565)	(100,00)
2	BAPPEBTI	292.000.000	119.200.000	172.800.000	144,97
3	DITJEN SPK	63.854.995	104.405.000	(40.550.005)	(38,84)
	Jumlah	355.854.995	708.818.565	(352.963.570)	(49,80)

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih –
Piutang Bukan Pajak
(Rp289.639.740)

C.1.6. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar (Rp289.639.740) dan (Rp61.958.768) yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak tersaji pada Tabel 36.

Tabel 36
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

No	Uraian	31-12-2014 (Rp)	31-12-2013 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	DITJEN PDN	0	(2.426.068)	2.426.068	(100,00)
2	BAPPEBTI	(255.483.500)	(52.496.000)	(202.987.500)	386,67
3	DITJEN SPK	(34.156.240)	(7.036.700)	(27.119.540)	385,40
	Jumlah	(289.639.740)	(61.958.768)	(227.680.972)	367,47

Bagian Lancar
Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
Rp340.130.256

C.1.7. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp340.130.256 dan Rp427.071.208 yang merupakan hak atau klaim terhadap pihak lain yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) tersaji pada Tabel 37.

Tabel 37
Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

No	Uraian	31-12-2014 (Rp)	31-12-2013 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	SETJEN	340.130.256	338.092.208	2.038.048	0,60
2	DITJEN SPK	0	88.979.000	(88.979.000)	(100,00)
	Jumlah	340.130.256	427.071.208	(86.940.952)	(20,36)

Penjelasan Bagian Lancar TP/TGR:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR sebesar **Rp340.130.256** adalah sebagai berikut:

Tabel 38
Rincian TP/TGR

No	Nama TP/TGR	Jumlah Kerugian	Nilai Setoran SKTJM	Saldo 31 Desember 2014	Jangka Pendek	Jangka Panjang	Keterangan
1	Tukul Yadi	14.497.125	5.590.855	8.906.270	8.906.270	-	Macet sejak 1997
2	Yuniarti	775.784.250	322.000.000	453.784.250	9.600.000	444.184.250	-
3	Hendro Bambang S	127.405.059	-	127.405.059	127.405.059	-	Macet sejak 1980
4	Edi Djunaedi	194.218.927	-	194.218.927	194.218.927	-	Macet sejak 1980
	Jumlah	1.111.905.361	327.590.855	784.314.506	340.130.256	444.184.250	

Keterangan:

TP/TGR jangka pendek adalah TP/TGR yang jatuh tempo dalam 12 bulan sejak tanggal neraca.

Tagihan tuntutan perbendaharaan atas nama Yuniarti dipisahkan untuk bagian jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek dihitung sebesar 12 x Nilai angsuran menurut nilai SKTJM.

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Bagian Lancar
Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
(Rp330.578.256)

C.1.8. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar (Rp330.578.256) dan (Rp333.761.103) yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR). Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersaji pada Tabel 39.

Tabel 39
Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

No	Uraian	31-12-2014 (Rp)	31-12-2013 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	(330.578.256)	(333.761.103)	3.182.847	(0,95)
	Jumlah	(330.578.256)	(333.761.103)	3.182.847	(0,95)

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto) tersaji pada tabel 40.

Tabel 40
Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)

No	Uraian	31-12-2014 (Rp)	31-12-2013 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	340.130.256	427.071.208	(86.940.952)	(25,56)
2	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	(330.578.256)	(333.761.103)	3.182.847	(0,96)
	Jumlah	9.552.000	93.310.105	(83.758.105)	(876,86)

Tabel 41
Perhitungan Penyisihan TP/TGR

TP/TGR	Jangka Pendek	Jangka Panjang	Kategori	Besaran Penyisihan	Penyisihan Piutang	Jangka Pendek	Jangka Panjang
Sekretariat Jenderal							
Tukul Yadi	8.906.270	-	Macet	100%	8.906.270	8.906.270	-
Yuniarti	9.600.000	444.184.250	Lancar	5 per mil	2.268.921	48.000	2.220.921
Hendro B.S.	127.405.059	-	Macet	100%	127.405.059	127.405.059	-
Edi Djunaedi	194.218.927	-	Macet	100%	194.218.927	194.218.927	-
JUMLAH	340.130.256	460.984.250			332.799.177	330.578.256	2.220.921

Keterangan:

Penyisihan TP/TGR bagian jangka pendek dan jangka panjang dihitung secara proporsional dari nilai penyisihan total. Nilai tagihan TP/TGR Jangka Pendek - netto sebagai berikut:

TP/TGR Jangka Pendek	340.130.256
Penyisihan TP/TGR Jangka Pendek	330.578.256
TP/TGR Jangka Pendek - Netto	9.552.000

Persediaan

Rp8.259.474.482

C.1.9. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp8.259.474.482 dan Rp13.396.063.435. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per tanggal 31 Desember 2014 tersaji pada Tabel 42.

Tabel 42
Rincian Persediaan

No	Uraian	31-12-2014 (Rp)	31-12-2013 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Barang Konsumsi	4.905.134.594	3.562.811.913	1.342.322.681	37,68
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	88.441.189	172.121.838	(83.680.649)	(48,62)
3	Suku Cadang	35.768.557	46.812.530	(11.043.973)	(23,59)
4	Pita Cukai, Materai dan Leges	780.510.790	137.324.220	643.186.570	468,37
5	Peralatan dan Mesin Untuk Dijual Atau Diserahkan Kepada Masyarakat	152.479.350	208.192.180	(55.712.830)	(26,76)
6	Aset Tetap Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	15.000.000	(166.642.976)	181.642.976	(109,00)
7	Aset Lain-lain Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	938.409.010	967.087.150	(28.678.140)	(2,97)
8	Barang Persediaan Lainnya Untuk Dijual/Diserahkan Ke Masyarakat	1.182.204.823	6.459.258.516	(5.277.053.693)	(81,70)
9	Bahan Baku	2.943.637	11.761.191	(8.817.554)	(74,97)
10	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga - jaga	5.535.368	991.340	4.544.028	458,37
11	Persediaan Lainnya	153.047.164	1.996.345.533	(1.843.298.369)	(92,33)
	Jumlah	8.259.474.482	13.396.063.435	(5.136.588.953)	(38,34)

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Nilai persediaan per 31 Desember 2014 per Eselon 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 43
Nilai Persediaan per Eselon I

No	Uraian	31-12-2014 (Rp)	31-12-2013 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	SETJEN	1.170.447.928	1.529.041.494	(358.593.566)	(23,45)
2	DITJEN PDN	2.841.179.534	2.008.686.360	832.493.174	41,44
3	DITJEN DAGLU	1.224.943.519	1.051.966.433	172.977.086	16,44
4	DITJEN KPI	5.460.600	6.132.000	(671.400)	(10,95)
5	ITJEN	17.179.888	19.103.871	(1.923.983)	(10,07)

No	Uraian	31-12-2014 (Rp)	31-12-2013 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
6	DITJEN PEN	684.693.748	1.013.527.670	(328.833.922)	(32,44)
7	BAPPEBTI	624.090.493	6.777.538.675	(6.153.448.182)	(90,79)
8	BPPKP	403.337.400	342.536.190	60.801.210	17,75
9	DITJEN SPK	1.288.141.372	647.530.742	640.610.630	98,93
	Jumlah	8.259.474.482	13.396.063.435	(5.136.588.953)	(38,34)

Nilai persediaan Kementerian Perdagangan per 31 Desember 2014 telah berdasarkan hasil *stock opname*.

Aset Tetap

Rp3.784.596.151.441

C.2. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp3.784.596.151.441 dan Rp3.855.263.970.699 yang merupakan asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap Kementerian Perdagangan per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 44
Rincian Aset Tetap

No	Uraian	31-12-2014 (Rp)	31-12-2013 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Tanah	633.535.700.530	634.471.700.530	(936.000.000)	(0,15)
2	Peralatan dan Mesin	725.655.795.497	720.473.649.562	5.182.145.935	0,72
3	Gedung dan Bangunan	3.108.732.611.878	3.146.299.348.525	(37.566.736.647)	(1,19)
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	26.395.033.044	26.248.898.044	146.135.000	0,56
5	Aset Tetap Lainnya	26.685.579.268	15.310.559.767	11.375.019.501	74,30
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	65.126.618.092	53.529.288.335	11.597.329.757	21,67
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(801.535.186.868)	(741.069.474.064)	(60.465.712.804)	8,16
	Jumlah	3.784.596.151.441	3.855.263.970.699	(70.667.819.258)	(1,83)

Tanah

Rp633.535.700.530

C.2.1. Tanah

Saldo Tanah per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp633.535.700.530 dan Rp634.471.700.530. Rincian aset Tanah secara detail per 31 Desember 2014 per Eselon I tersaji pada Tabel 45.

Tabel 45
Rincian Tanah per Eselon I

No	Uraian	31-12-2014 (Rp)	31-12-2013 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	SETJEN	354.484.729.000	354.484.729.000	0	0,00
2	DITJEN PEN	169.577.544.000	169.577.544.000	0	0,00
3	BAPPEBTI	0	936.000.000	(936.000.000)	(100,00)
4	DITJEN SPK	109.473.427.530	109.473.427.530	0	0,00
	Jumlah	633.535.700.530	634.471.700.530	(936.000.000)	(0,15)

Tabel 46
Rincian Nilai Tanah

No	Satker		KIB	Luas Tanah	Nilai
1	Biro Umum	1	2.01.01.01.001.1	2.815	5.686.300.000
		2	2.01.01.01.002.1	3.647	8.719.977.000
		3	2.01.01.01.002.2	557	3.026.181.000
		4	2.01.01.01.002.3	763	5.188.400.000
		5	2.01.01.01.003.1	220	1.195.260.000
		6	2.01.01.01.003.2	210	671.370.000
		7	2.01.01.04.001.1	12.940	194.151.760.000
		8	2.01.01.04.001.2	1.711	16.042.336.000
		9	2.01.01.04.001.3	2.350	24.270.800.000
		10	2.01.01.04.001.4	5.704	38.233.912.000
		11	2.01.01.04.001.5	1.184	25.392.520.000
		12	2.01.02.02.002.1	4.340	1.735.498.000
		13	2.01.02.02.002.2	1.597	697.916.000
		14	2.01.02.02.002.3	977	578.790.000
2	Pusdiklat	1	2.01.01.04.002.1	5.780	1.941.000.000
		2	2.01.01.04.002.2	5.250	3.858.750.000
		3	2.01.01.04.002.3	10.660	7.483.320.000
3	PPSDMK	1	2.01.01.04.001.1	16.807	15.610.639.000
4	Pusat Pelatihan Ekspor Indonesia	1	2.01.01.04.001.1	10.408	169.577.544.000
5	BSML Makassar	1	2.01.01.04.001.1	3.247	2.993.212.000
6	BSML Medan	1	2.01.02.02.999.1	3.500	2.999.254.000
7	BSML Jogjakarta	1	2.01.01.04.001.1	3.220	2.958.400.000
8	BSML Banjarmasin	1	2.01.01.04.001.1	10.354	2.992.306.000
8	Dit PMB	1	2.01.01.04.001.2	19.850	27.510.000.000
9	Dit Metrologi	1	2.01.01.04.001.1	4.922	15.121.122.569
		2	2.01.01.01.001.2	1165	2.541.799.759
		3	2.01.01.01.001.3	835	2.588.980.000
		4	2.01.01.01.004.1	9.738	49.768.353.202
			Jumlah	144.751	633.535.700.530

Penambahan dan pengurangan nilai Tanah adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2013	634.471.700.530
Mutasi Kurang	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(936.000.000)
Saldo per 31 Desember 2014	633.535.700.530

MUTASI KURANG

Mutasi kurang tanah tersebut berupa tanah milik Kementerian Perdagangan dan tercatat pada satker Bappebti. Tanah tersebut terletak di wilayah Kabupaten Cianjur dan dipergunakan untuk Pembangunan Gudang SRG sebagai pelaksanaan atas tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan

khususnya dalam hal penyediaan Sarana Ketahanan Pangan Nasional. Pimpinan Kementerian Perdagangan menyetujui hibah tanah tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam rangka operasional penyelenggaraan Sistem Resi Gudang. Usulan hibah telah diajukan pada tanggal 12 November 2014 kepada Menteri Perdagangan selaku Pengguna Barang untuk selanjutnya diajukan kepada Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang, melalui surat No. 160/BAPPEBTI/SD/11/2014 dan posisi saat ini sudah diproses oleh Sekretariat Jenderal untuk hibah BMN tersebut.

Peralatan dan Mesin
Rp725.655.795.497

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp725.655.795.497 dan Rp720.473.649.562. Rincian aset Peralatan dan Mesin secara detail per 31 Desember 2014 per Eselon I tersaji pada Tabel 47.

Tabel 47
Rincian Peralatan dan Mesin per Eselon I

No	Uraian	31-12-2014 (Rp)	31-12-2013 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	SETJEN	186.890.944.598	174.930.226.771	11.960.717.827	6,84
2	DITJEN PDN	35.241.131.355	32.834.770.455	2.406.360.900	7,33
3	DITJEN DAGLU	31.012.837.843	30.093.723.711	919.114.132	3,05
4	DITJEN KPI	14.259.516.283	13.696.195.719	563.320.564	4,11
5	ITJEN	9.958.717.774	10.047.449.004	(88.731.230)	(0,88)
6	DITJEN PEN	44.730.119.557	43.704.571.695	1.025.547.862	2,35
7	BAPPEBTI	53.051.131.580	53.677.186.660	(626.055.080)	(1,17)
8	BPPKP	36.673.404.888	31.632.481.608	5.040.923.280	15,94
9	DITJEN SPK	313.837.991.619	329.857.043.939	(16.019.052.320)	(4,86)
	Jumlah	725.655.795.497	720.473.649.562	5.182.145.935	0,72

Kenaikan nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2013	720.473.649.562
Mutasi Tambah	
Penambahan Saldo Awal	129.937.619
Pembelian	33.540.644.148
Transfer Masuk	574.885.000
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	1.153.911.000
Reklasifikasi Masuk	6.000.742.314
Perolehan Lainnya	3.999.955.500
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset T	12.910.000
Pengembangan Nilai Aset	4.091.509.725
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	65.360.800
Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	35.568.435

Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	(129.391.494)
Penghapusan	(127.200.000)
Transfer Keluar	(574.885.000)
Hibah (Keluar)	(203.025.000)
Reklasifikasi Keluar	(5.967.761.271)
Koreksi Pencatatan	(212.433.831)
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	(600.000)
Usulan Barang Hilang ke Pengelola	(105.150.000)
Penghapusan semu karena reklasifikasi dar	(475.000)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(37.102.357.010)
Saldo per 31 Desember 2014	725.655.795.497
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2014	(567.690.495.995)
Nilai Buku per 31 Desember 2014	157.965.299.502

A. MUTASI TAMBAH

1. Penambahan saldo awal sebesar 129.937.619 untuk mencatat hasil inventarisasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 48
Rincian Penambahan Saldo Awal Hasil Inventarisasi

No.	Nama Satker	Nilai	Keterangan
1	Atdag Bangkok	80.597.759	BA Inventarisasi BMN No. 002/Atdag.BKK/I/2014
2	Atdag Seoul	10.452.427	BA Inventarisasi BMN No. 04/ATDAG/8/2014
3	Atdag Paris	3.931.672	BA Inventarisasi BMN No. 237A/KET/11/IX/2014
4	Atdag Kuala Lumpur	4.105.761	BA Inventarisasi BMN No. 143A/PERD/VIII/2014
5	Disperindagkop Kab. Banyumas	30.850.000	
Jumlah		129.937.619	

2. Pembelian sebesar Rp33.540.644.148 terdiri dari:

No.	Nama Satker	Nilai
1	Setjen Biro	2.211.801.400
2	Humas	341.710.200
3	Pusdiklat	388.095.980
4	Biro Perencanaan	632.750.000
5	Biro Umum	2.649.650.150
6	PPSDMK	4.007.117.950
7	Atdag Roma	456.475.895
8	Atdag London	538.172.559
9	ITN Jenewa	12.940.585
10	Atdag Paris	36.250.973
11	Atdag Madrid	46.643.096
12	KDEI	1.034.070.709
13	Atdag New Delhi	14.324.893
14	Atdag Bangkok	489.355.532

15	Atdag Kuala Lumpur	14.688.511
16	Atdag Singapura	21.703.958
17	Atdag Manila	99.209.548
18	Atdag Cairo	532.742.090
19	Dit.Bapokstra	1.332.880.000
20	Dit.DKM & PDN	264.497.500
21	Set.Ditjen PDN	864.218.000
22	Dit.Logistik dan Sarana Distribusi	674.464.800
23	Dit.Binus	851.050.000
24	Set. Ditjen Daglu	1.145.448.500
25	Dit. Ekspor Produk Pertanian & Kehutanan	113.817.000
26	Dit. Ekspor Produk Industri & Pertambangan	72.000.000
27	Dit. Impor	229.950.000
28	Dit. Fasilitasi Ekspor & Impor	273.050.000
29	Dit. Pengamanan Perdagangan	244.366.500
30	Ditjen KPI	2.356.467.400
31	Itjen	316.900.000
32	Set. Ditjen Pen	897.290.362
33	Ditjen PEN	56.828.000
34	BBPPEI	410.512.500
35	BAPPEBTI	1.939.802.260
36	BP2KP	2.254.897.100
37	Dit. Standardisasi	216.939.797
38	Set. Ditjen. SPK	419.927.000
39	Dit. Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	498.535.000
40	Dit. Pemberdayaan Konsumen	215.780.000
41	BPKN	92.000.000
42	Dit. PMB	709.531.800
43	BPMB	446.792.500
44	Balai Kalibrasi	91.160.300
45	Balai Sertifikasi	69.372.000
46	Dit. Metrologi	2.258.896.500
47	BSML I	176.962.500
48	BSML II	134.344.000
49	BSML III	136.816.000
50	BSML IV	247.442.800
Jumlah		33.540.644.148

3. Transfer masuk sebesar Rp574.885.000 terdiri dari:

- Transfer masuk dari Set. Ditjen Daglu ke Biro Umum berupa sedan senilai Rp378.700.000.
- Transfer masuk dari Biro Perencanaan ke Dit. Standardisasi sebesar Rp196.185.000.

4. Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP sebesar Rp1.153.911.000 terdiri dari:

- Penyelesaian pembangunan *Weapon and Metal Detector (Check Gate)* pada Biro Umum sebesar Rp1.153.911.000.

5. Reklasifikasi masuk sebesar Rp6.000.742.314 terdiri dari:

a. Koreksi kesalahan pencatatan kode BMN sebesar Rp23.317.809 pada Atdag Roma.

Kode Lama	Unit	Jumlah	Kode Baru	Unit	Jumlah
3100201006	2	15.982.748	3100203001	3	15.989.391
3100203002	3	7.328.418	3100203002	3	7.328.418
Jumlah		23.311.166			23.317.809

b. Koreksi Kesalahan Pencatatan Kode BMN sebesar Rp18.136.203 pada Atdag Paris.

Kode Lama	Unit	Jumlah	Kode Baru	Unit	Jumlah
3050104001	1	9.400.932	3050104002	1	9.400.932
3050201001	3	8.405.271	3050201002	3	8.405.271
3050105047	1	330.000	3050206072	1	330.000
Jumlah		18.136.203			18.136.203

c. Koreksi Kesalahan Pencatatan Kode BMN sebesar Rp35.674.400 pada Atdag Bangkok

Kode Lama	Unit	Jumlah	Kode Baru	Unit	Jumlah
6010101001	3	32.974.400	3100102001	3	32.974.400
3080113081	2	2.700.000	3100203002	2	2.700.000
Jumlah		35.674.400			35.674.400

d. Koreksi Kesalahan Pencatatan Kode BMN sebesar Rp51.061.486 pada Atdag Kuala Lumpur

Kode Lama	Unit	Jumlah	Kode Baru	Unit	Jumlah
3100102002	1	16.852.359	3100102001	1	16.852.359
3100102001	1	20.368.868	3100102002	1	20.368.868
3050104002	1	1.964.804	3050104024	1	1.964.804
3050201004	1	9.124.730	3050201005	1	9.124.730
3050201002	1	2.750.725	3050201009	1	2.750.725
Jumlah		51.061.486			51.061.486

- e. Koreksi Kesalahan Pencatatan Kode BMN sebesar Rp3.500.000 pada Disperindagkop Kab. Banyumas

Kode Lama	Unit	Jumlah	Kode Baru	Unit	Jumlah
3060102135	1	2.000.000	3100203002	1	2.000.000
3080141251	1	1.500.000	3050206017	1	1.500.000
Jumlah		3.500.000			3.500.000

- f. Koreksi Kesalahan Pencatatan Kode BMN pada Set. Ditjen PEN dari sedan dan mini bus menjadi sedan, jeep, station wagon dan mini bus sebesar Rp4.510.232.416
- g. Reklasifikasi masuk Dit. Pemberdayaan Konsumen pada PC unit sebesar Rp59.400.000
- h. Reklasifikasi masuk BSML I (Medan) dari alat kantor lainnya menjadi CCTV - Camera Control Television System, LCD Projector/Infocus, A.C. Split, Finger Printer Time and Attendance Acces Control System, personal computer, laptop, printer (peralatan personal komputer) sebesar Rp189.420.000
- i. Koreksi Kesalahan Pencatatan Kode BMN pada BSML III (Banjarmasin) dari Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu sesuai dengan Surat Keterangan Reklas BMN No 99/SPK.6.11/KET/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 sebesar Rp1.110.000.000.
6. Perolehan lainnya sebesar Rp3.999.955.500 untuk mencatat transaksi pengadaan peralatan dan mesin (Alat Pengering - Dryer) pada Bappebti.
7. Reklasifikasi dari aset lainnya ke aset tetap sebesar Rp12.910.000 yaitu pada BBPPEI sebesar Rp12.850.000 berupa Tensile Strength Tester dan Dit. PMB sebesar Rp60.000 berupa Audio Visual karena berdasarkan hasil inventarisasi. BMN tersebut masih digunakan untuk operasional perkantoran.
8. Pengembangan nilai aset sebesar Rp4.091.509.725 terdiri dari:
- Pengembangan Sedan sebesar Rp10.550.725 pada Atdag Bangkok.
 - Pengembangan Server sebesar Rp10.450.000 pada Dit. Ekspor Produk Pertanian & Kehutanan.
 - Pengembangan Peralatan jaringan lainnya sebesar Rp3.700.444.000 pada BP2KP.
 - Pengembangan Stationary Generating Set dan Mesin Antrian sebesar Rp146.465.000 pada Dit. PMB.

- e. Pengembangan A.C Split dan Server sebesar Rp19.090.000 pada Balai Sertifikasi.
 - f. Pengembangan Meter Calibrator dan P.C Unit sebesar Rp204.510.000 pada Ditmet.
9. Koreksi pencatatan nilai/kuantitas (+) sebesar Rp65.360.800 terdiri dari:
- a. Atdag KDEI sebesar Rp800.
 - b. Koreksi nilai pada Dit. Bapokstra sebesar Rp47.525.000 karena kesalahan pencatatan nilai pembelian.
 - c. Dit. Impor sebesar Rp17.835.000.
10. Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap sebesar Rp35.568.435 untuk menormalkan nilai BMN dengan saldo negative atau BMN dengan nilai kuantitas nol. pada Satuan Kerja berikut:

No	Nama Saker	Nilai
1	Biro Umum	32.670.000
2	Atdag Den Haag	(123.393)
3	Atdag New Delhi	148.828
4	Dit.PMB	2.873.000
Jumlah		35.568.435

B. MUTASI KURANG

- 1. Koreksi pencatatan nilai/kuantitas (-) sebesar Rp129.391.494 terdiri dari:
 - a. Koreksi sebesar Rp23.450.000 pada Setjen Biro.
 - b. Koreksi Sebesar Rp88.828.290 pada ITN Jenewa.
 - c. Koreksi sebesar Rp17.113.204 pada Atdag Kuala Lumpur.
- 2. Penghapusan sebesar Rp127.200.000 terdiri dari:
 - a. Penghapusan BMN berupa sepeda motor sebesar Rp30.900.000 pada Set. Ditjen. PDN.
 - b. Penghapusan BMN berupa mini bus sebesar Rp 96.300.000 pada Set. Ditjen. Daglu.
- 3. Transfer keluar sebesar Rp574.885.000 terdiri dari:
 - a. Transfer keluar dari set. Ditjen Daglu ke Biro Umum berupa sedan senilai Rp378.700.000.

- b. Transfer keluar dari Biro Perencanaan ke Dit. Standardisasi sebesar Rp196.185.000.
4. Hibah Keluar sebesar Rp203.025.000 pada satker Dekonsentrasi Provinsi Banten dan Provinsi Jambi.
5. Reklasifikasi keluar sebesar Rp5.967.761.271 terdiri dari:
 - a. Pada Atdag Roma terdapat Koreksi kesalahan pencatatan kode BMN sebesar Rp23.311.166 dengan dasar pencatatan BA Inventarisasi BMN No.37/DAG/VI/2014.
 - b. Pada Atdag Paris terdapat Koreksi kesalahan pencatatan kode BMN sebesar Rp18.136.203 dengan dasar pencatatan BA Inventarisasi BMN No.237/A/KET/11/IX/2014.
 - c. Pada Atdag Bangkok terdapat Koreksi kesalahan pencatatan kode BMN sebesar Rp2.700.000 dengan dasar pencatatan BA Inventarisasi BMN No.002/Atdag.BKK/I/2014.
 - d. Pada Atdag Kuala Lumpur terdapat Koreksi kesalahan pencatatan kode BMN sebesar Rp51.061.486 dengan dasar pencatatan BA Inventarisasi BMN No.143A/Perd/VIII/2014.
 - e. Pada Set. Ditjen. PEN terdapat Koreksi kesalahan pencatatan kode BMN sebesar Rp4.510.232.416
 - f. Pada Satker PDN terdapat Koreksi kesalahan pencatatan kode BMN sebesar Rp3.500.000
 - g. Pada Dit. Pemberdayaan Konsumen terdapat Koreksi kesalahan pencatatan kode BMN sebesar Rp59.400.000
 - h. Pada BSML I terdapat Koreksi kesalahan pencatatan kode BMN sebesar Rp189.420.000
 - i. Pada BSML III terdapat Koreksi kesalahan pencatatan kode BMN sebesar Rp1.110.000.000.
6. Koreksi pencatatan sebesar Rp212.433.831 terdiri dari:
 - a. Atdag Paris sebesar Rp5.414.761
 - b. Atdag Canberra sebesar Rp161.395.420
 - c. Atdag Kuala Lumpur sebesar Rp45.623.650.
7. Usulan Barang Rusak ke pengelola sebesar Rp600.000 pada Setjen Biro berupa kursi kayu.

8. Usulan Barang Hilang ke pengelola sebesar Rp105.150.000 pada Biro Perencanaan berupa Mini Bus.
9. Penghapusan semu karena Reklasifikasi sebesar Rp475.000 pada Setjen Biro berupa printer.
10. Penghentian asset dari penggunaan karena kondisi barang yang sudah rusak berat maupun karena dalam proses hibah sebesar Rp37.102.357.010 dengan rincian :

No	Nama Satker	Nilai (Rp)
1	Setjen Biro	663.853.500
2	Pusat Humas	18.872.700
3	Biro Umum	654.095.000
4	Atdag Roma	59.788.772
5	Atdag London	313.758.434
6	Atdag Berlin	58.640.659
7	ITN Jenewa	82.664.498
8	Atdag Paris	48.684.282
9	Atdag New Delhi	31.318.206
10	Atdag Tokyo	104.355.315
11	Atdag Seoul	7.315.000
12	Atdag Canberra	82.685.635
13	Atdag Bangkok	221.438.784
14	Atdag Kuala Lumpur	19.738.390
15	Atdag Manila	39.874.800
16	Atdag Cairo	223.593.524
17	Dit. Logistik & Sarana Distribusi	69.057.400
18	Disperindag Prov. Jawa Barat	68.660.000
19	Disperindag dan UKM D.I. Yogyakarta	6.880.000
20	Disperindagkop Prov. Jawa Timur	30.300.000
21	Disperindag Prov. Riau	96.950.000
22	Disperindag Prov. Sumatera Selatan	108.075.000
23	Disperindag Prov. Kalimantan Barat	24.925.000
24	Disperindag Prov. Kalimantan Selatan	103.025.000
25	Disperindagkop DAN Umkm Prov. Kalimantan Timur	121.945.000
26	Diskop. UMKM Perindag Prov. Sulawesi Tengah	54.300.000
27	Disperindag Prov. Sulawesi Tenggara	71.500.000
28	Disperindag Prov. NTB	94.185.000
29	Disperindag Prov. Papua	271.225.000
30	Disperindag Prov. Bengkulu	50.060.000
31	Disperindag Prov. Bangka Belitung	167.000.000

32	P2DN Prop.Kepulauan Riau	35.000.000
33	Diskop UKM Perindag Prov. Sulawesi Barat	52.112.000
34	Sekretariat Ditjen Perdagangan Luar Negeri	571.407.000
35	Direktorat Pengamanan Perdagangan	141.395.868
36	Ditjen Kerja Sama Perdagangan Internasional	1.793.146.836
37	Inspektorat Jenderal	405.631.230
38	Set Ditjen PEN	216.265.000
39	BBPPEI	135.668.000
40	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	59.900.000
41	Disperindag Kop. UKM Kab. Demak	9.800.000
42	Disperindag tamben Kab. Grobogan	7.500.000
43	Disperindag Kop. UKM Kab. Sumenep	997.981.400
44	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pasuruan	206.800.000
45	Disperindag Kop. UKM Kab. Probolinggo	215.875.000
46	Disperindag Kop. UKM Kab. Nganjuk	250.000.000
47	Disperindag Kop. UKM Kab. Pidie Jaya	8.954.600
48	Diskopperindag & UMKM Kab. Solok	85.115.300
49	Disperindag Kop. UKM Kab. Tanah Datar	12.320.000
50	Disperindag Kop. UKM Kab. Barito Kuala	29.150.000
51	Disperindag Kop. UKM Kab. Minahasa Selatan	1.469.319.500
52	Disperindagem Kab. Pinrang	91.306.000
53	Disperindag Kop. UKM Kab. Gowa	55.541.040
54	Disperindag Kop. UKM Kab. Gorontalo	3.066.250.000
55	Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan	914.417.820
56	Direktorat Standardisasi	512.946.977
57	Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	201.510.000
58	Badan Perlindungan Konsumen Nasional	235.640.000
59	Direktorat Pengembangan Mutu Barang	3.155.308.300
60	Balai Penguji Mutu Barang	170.788.940
61	Direktorat Metrologi	18.008.251.300
62	Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional II	13.290.000
63	BSML Regional III (Banjarmasin)	5.000.000
Jumlah		37.102.357.010

Gedung dan
Bangunan
Rp3.108.732.611.878

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp3.108.732.611.878 dan Rp3.146.299.348.525. Rincian aset Gedung dan Bangunan secara detail per 31 Desember 2014 per Eselon I tersaji pada Tabel 49.

Tabel 49
Rincian Gedung dan Bangunan per Eselon I

No	Uraian	31-12-2014 (Rp)	31-12-2013 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	SETJEN	640.775.151.376	638.041.902.096	2.733.249.280	0,43
2	DITJEN PDN	2.315.306.413.473	2.215.297.694.068	100.008.719.405	4,51
3	DITJEN DAGLU	7.739.601.240	7.739.601.240	0	0,00
4	DITJEN PEN	33.394.822.000	33.394.822.000	0	0,00
5	BAPPEBTI	16.364.632.818	152.902.127.350	(136.537.494.532)	(89,30)
6	DITJEN SPK	95.151.990.971	98.923.201.771	(3.771.210.800)	(3,81)
	Jumlah	3.108.732.611.878	3.146.299.348.525	(37.566.736.647)	(1,19)

Mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2013	3.146.299.348.525
Mutasi Tambah	
Transfer Masuk	45.978.780.650
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	206.788.468.420
Reklasifikasi Masuk	520.450.300
Perolehan Lainnya	1.783.866.000
Pengembangan Nilai Aset	2.278.840.000
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	96.511.280
Pengembangan Melalui KDP	118.717.000
Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	(416.871.506)
Transfer Keluar	(45.978.780.650)
Hibah (Keluar)	(5.016.074.750)
Reklasifikasi Keluar	(520.450.300)
Koreksi Pencatatan	(2.204.130.000)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(240.996.063.091)
Saldo per 31 Desember 2014	3.108.732.611.878
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2014	(212.626.201.014)
Nilai Buku per 31 Desember 2014	2.896.106.410.864

A. MUTASI TAMBAH

1. Transfer masuk sebesar Rp45.978.780.650 terdiri dari:

Disperindag Kab. Cirebon	4.649.344.000
Disperindag Prov. Jambi	7.470.848.000
Diskopdag dan Usaha Kecil Kota Pare Pare	19.526.124.650
DisperindagkopPM Kab.Bombana	5.846.167.000
Disperindag Kota Bau Bau	3.995.297.000
Disperindag Kab.Seram Timur	4.491.000.000

2. Penyelesaian pembangunan dengan KDP sebesar Rp206.788.468.420 terdiri dari:

Nama Satker	Nilai (Rp)
SEKRETARIAT JENDERAL	
PPSDMK	441.797.000
Sub Total Setjen	441.797.000

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
Dinas Koperasi UKM Perindag Kab. Tojo Una Una	8.950.000.000
Dinas Koperasi,. Perindustrian dan Perdagangan Kab.Maros	4.797.144.000
Dinas Perindagkop dan UKM Kab. Tapin	7.785.075.000
Dinas Perindagkop Kota Lhokseumawe	3.824.075.000
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab.Konawe Selatan	5.833.940.000
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palembang	11.824.610.000
Diskoperindag Kab. Toba Samosir	7.737.970.000
Diskoperindag Kota Bima	5.572.168.000
Diskopindag Kab. Lamongan	8.723.911.000
Diskopperindag Invesda Kab. Pohuwato	4.792.457.000
Dispeindag PMTAM Kab.Bone	4.744.440.000
Disperindag Ambon	4.509.884.000
Disperindag Boalemo	4.769.261.000
Disperindag Kab. Aceh Utara	3.104.057.000
Disperindag Kab. Bima	3.180.280.000
Disperindag Kab. Buru	4.747.262.000
Disperindag Kab. Buru Selatan	2.814.752.000
Disperindag Kab. Halmahera Barat	8.539.290.000
Disperindag Kab. Labuhan Batu Utara	4.701.400.000
Disperindag Kab. Tulang Bawang	5.839.958.000
Disperindag Kab.Seram Timur	3.753.779.000
Disperindag Kab.Serang	7.690.340.540
Disperindag Kota Bau Bau	6.769.133.000
Disperindag Kota Lubuk Linggau	4.791.135.000
Disperindagkop & UKM Kota Langsa	2.874.210.000
Disperindagkop IMKM Kab. Cilacap	4.860.327.000
Disperindagkop Kab. Kebumen	7.721.675.000
Disperindagkop Kab. Muara Enim	5.874.595.000
Disperindagkop Kab.Jayawijaya	5.780.898.000
Disperindagkop Kab.Pangkep	7.262.007.000
Disperindagkop Kota Bitar	7.387.655.000
Disperindagkop UKM Kab. Aceh Barat Daya	2.593.862.880
Disperindagkop UKM Kab. Aceh Besar	4.133.055.000
Disperindagkop UKM Kab. Sarmi	8.791.065.000
Disperindagkoppm Kab.Bombana	9.271.000.000
Sub Total PDN	206.346.671.420
Total	206.788.468.420

3. Reklasifikasi Masuk sebesar Rp520.450.300 pada BSML Banjarmasin dengan Surat Keterangan Reklasifikasi BAST Nomor 448/SPK.6.11/BAST/11/2013.
4. Perolehan lainnya sebesar Rp1.783.866.000 pada satker Bappebti, merupakan pembuatan rumah dryer pada gudang SRG di daerah Palopo, Purwakarta, Mamuju, Masohi dan Pidie.
5. Pengembangan nilai aset sebesar Rp2.278.840.000 terdiri dari:
 - a. Pengembangan bangunan gedung kantor, bangunan olah raga dan rumah negara pada Biro Umum senilai Rp2.194.941.000.
 - b. Pengembangan bangunan gedung kantor dan rumah negara pada BSML II senilai Rp64.913.000.
 - c. Pengembangan bangunan parkir pada BSML Makasar senilai Rp18.986.000.
6. Penerimaan Aset Tetap Renovasi sebesar Rp96.511.280 merupakan pencatatan renovasi gedung pada Biro Umum.
7. Pengembangan melalui KDP sebesar Rp118.717.000 pada Disperindag Kab. Labuhan Batu Utara.

B. MUTASI KURANG

1. Koreksi pencatatan nilai/kuantitas (-) sebesar Rp416.871.506 terdiri dari:

Satker	Nilai (Rp)
Disperindagkop Kab. Banyumas	30.850.000
Diskopperindag Kota Mojokerto	372.410.706
Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional II	13.610.800

2. Transfer keluar sebesar Rp45.978.780.650 terdiri dari:

Satker	Nilai (Rp)
Disperindag Kab.Cirebon	4.649.344.000
Disperindag Prov. Jambi	7.470.848.000
Dinas Perindagkop UKM Kota Pare Pare	19.526.124.650
Disperindag PM Kab. Bombana	5.846.167.000
Disperindagkop UKM Kota Bau-Bau	3.995.297.000
Disperindag Kab.Seram Bagian Timur	4.491.000.000

3. Hibah (keluar) sebesar Rp5.016.074.750 yang merupakan hibah bangunan pasar kepada Pemerintah Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan dengan rincian berikut:

Nama Pasar	Nilai (Rp)
Pasar Desa Timurung	2.860.459.000
Pasar Desa Tokaseng	2.155.615.750
Total	5.016.750.000

Hibah gedung dan bangunan tersebut dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan Pengelola Barang dhi. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan berdasarkan Surat Nomor S-79/MK.6/KN.5/2014 tanggal 25 April 2014. Penghapusan gedung dan bangunan tersebut dari Daftar Barang Milik Negara berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Nomor 758/M-DAG/KEP/6/2014 tanggal 27 Juni 2014.

4. Reklasifikasi Keluar sebesar Rp520.450.300 pada BSML Banjarmasin dengan Surat Keterangan Reklas Surat Keterangan Reklas BMN No. 100/SPK.6.11/KET/III/2014.
5. Koreksi pencatatan sebesar Rp2.204.130.000 yang merupakan pasar Pujasera (Inpres) Kota Lhokseumawe yang dibangun pada Tahun 2013 dan pada Neraca per 31 Desember 2013 disajikan sebagai aset tetap gedung dan bangunan padahal bangunan pasar tersebut belum selesai 100%, sehingga pada Tahun 2014, penyajian aset pasar tersebut dikoreksi menjadi aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
6. Penghentian aset dari penggunaan sebesar Rp240.996.063.091 terdiri dari:

No.	Satker	Nilai (Rp)
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI		
1	Setditjen PDN	4.857.243.050
2	Disperindag Kota Surakarta	4.824.529.000
3	Disperindag DIY (TP)	4.271.680.000
4	Disperindag ESDM Kab. Kulonprogo	4.955.000.000
5	Disperindag PE Kab. Karo	1.245.000.000
6	Disperindagkop Kab. Dairi	849.200.000

7	Disperindagkop Kab. Humbang Has	1.062.500.000
8	Diskoperindag Kab. Toba Samosir	1.697.584.000
9	Disperindag Kab. Batu Bara	3.000.000.000
10	Disperindag Invest Kota Dumai	8.796.712.455
11	Disperindagkop Kab. Tanjung Jabung Timur	979.697.000
12	Disperindag Kota Pagar Alam	1.247.900.000
13	Disperindagkop Kab. Bengkayang	838.500.000
14	Disperindag Kab. Balangan	1.143.381.000
15	Disperindag Kab. Kutai Barat	846.477.000
16	Diskop UKM Perindag Prov. Sulawesi Tengah	398.367.000
17	Disperindagkop Kota Palu	7.990.585.000
18	Disperindag Kab. Pinrang	4.829.484.000
19	Diskoperindag Kab. Luwu	977.500.000
20	Disperindag Kab. Bangli	4.047.050.000
21	Disperindag Kota Denpasar	7.132.959.600
22	Diskoperindag Kota Mataram	9.558.529.000
23	Disperindag Prov. Papua (TP)	7.453.115.000
24	Disperindag Prov. Papua (DK)	784.810.000
25	Disperindagkop Kab. Jayapura	499.602.000
26	Disperindag Kab. Lebong	849.935.000
27	Disperindag Kab. Bengkulu Utara	2.951.330.999
28	Disperindag Kab. Kepahiang	849.600.000
29	Disperindag Kota Bengkulu	9.894.932.455
Sub Total		98.833.203.559
BAPPEBTI		
1	Bappebti	3.854.950.000
2	Kab. Bogor	2.854.345.000
3	Kab. Cianjur	2.797.023.000
4	TP Kab. Purwakarta	2.846.392.500
5	Kab. Subang	2.710.329.000
6	Kab. Sumedang	2.889.476.465
7	Kab. Garut	2.367.931.000
8	Kab. Kuningan	2.360.862.000
9	Kab. Indramayu	2.870.890.000
10	Kab. Majalengka	2.905.795.000
11	Kab. Demak	5.783.153.000
13	Kab. Grobogan	2.728.450.000
14	Kab. Pekalongan	2.863.800.000
15	Kab. Kudus	5.715.312.000

17	Kab.Jepara	2.860.950.000
18	Kab.Banjarnegara	2.921.989.000
19	Kab.Bantul	2.914.557.250
20	Kab.Jombang	2.839.273.557
21	Kab.Sampang	5.805.599.000
23	Kab.Sumenep	4.023.416.100
25	Kab.Pasuruan	2.628.860.000
26	Kab.Probolinggo	5.409.906.000
32	Kab.Nganjuk	2.629.187.000
33	Kab.Madiun	2.896.015.000
34	Kab.Ngawi	2.734.964.000
35	Kab.Pidie	2.868.792.000
36	Kab.Pidie Jaya	2.550.533.000
37	Kab.Solok	2.390.096.700
38	Kab.Tanah Datar	2.584.150.000
39	Kab.Pasaman Barat	2.615.663.000
40	Kab.Musi Banyuasin	2.883.502.000
41	Kab.Barito Kuala	2.860.098.000
42	Kab.Minahasa Selatan	910.372.000
43	Kab.Pinrang	2.790.415.000
44	Kab.Gowa	2.832.251.960
45	Kab.Bone	5.719.919.000
47	Kab.Bantaeng	5.753.723.000
54	Kab.Takalar	2.392.759.000
55	Kab.Sindereng Rappang	2.794.289.000
56	Kab.Palopo	2.876.500.000
57	Kab.Maluku Tengah	2.824.982.000
58	Kab.Sumbawa	2.887.290.000
59	Kab.Lebak	2.887.884.000
60	Kab.Gorontalo	1.684.715.000
Sub Total		138.321.360.532
DIREKTORAT JENDERAL STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		
Direktorat Pengembangan Mutu Barang		3.841.499.000
Sub Total		3.841.499.000
Total		240.996.063.091

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp26.395.033.044

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp26.395.033.044 dan Rp26.248.898.044. Rincian aset Jalan, Irigasi dan Jaringan secara detail per 31 Desember 2014 per Eselon I tersaji pada Tabel 50.

Tabel 50
Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan per Eselon I

No	Uraian	31-12-2014 (Rp)	31-12-2013 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	SETJEN	5.570.256.383	5.477.581.383	92.675.000	1,69
2	DITJEN PDN	1.581.779.119	1.581.779.119	0	0,00
3	DITJEN DAGLU	7.558.800	2.308.800	5.250.000	227,39
4	DITJEN PEN	580.121.000	580.121.000	0	0,00
5	BAPPEBTI	475.090.000	505.090.000	(30.000.000)	(5,94)
6	BPPKP	17.471.271.390	17.471.271.390	0	0,00
7	DITJEN SPK	708.956.352	630.746.352	78.210.000	12,40
	Jumlah	26.395.033.044	26.248.898.044	146.135.000	0,56

Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2013	26.248.898.044
Mutasi Tambah	
Pembelian	176.135.000
Mutasi Kurang	
Penghentian Aset Dari Penggunaan	(30.000.000)
Saldo per 31 Desember 2014	26.395.033.044
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2014	(20.692.129.353)
Nilai Buku per 31 Desember 2014	5.702.903.691

Sedangkan transaksi penambahan dan pengurangan Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah berupa:

A. MUTASI TAMBAH

1. Pembelian sebesar Rp176.135.000 terdiri dari:

Satker	Nilai (Rp)
PPSDMK	92.675.000
Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor	5.250.000
Direktorat Pengembangan Mutu Barang	78.210.000

B. MUTASI KURANG

1. Penghentian aset dari penggunaan sebesar Rp30.000.000 dari Disperindag Kop. UKM Kab. Sumenep.

Aset Tetap Lainnya
Rp26.685.579.268

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp26.685.579.268 dan Rp15.310.559.767. Rincian Aset Tetap Lainnya secara detail per 31 Desember 2014 tersaji pada Tabel 51.

Tabel 51
Rincian Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	31-12-2014 (Rp)	31-12-2013 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Aset Tetap Dalam Renovasi	18.760.503.215	8.968.781.614	9.791.721.601	109,18
2	Aset Tetap Lainnya	7.925.076.053	6.341.778.153	1.583.297.900	24,97
	Jumlah	26.685.579.268	15.310.559.767	11.375.019.501	74,30

Rincian Aset Tetap Lainnya secara detail per 31 Desember 2014 per Eselon I tersaji pada Tabel 52.

Tabel 52
Rincian Aset Tetap Lainnya per Eselon I

No	Uraian	31-12-2014 (Rp)	31-12-2013 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	SETJEN	4.033.493.014	3.496.819.771	536.673.243	15,35
2	DITJEN PDN	16.101.746.173	5.968.288.403	10.133.457.770	169,79
3	DITJEN DAGLU	878.056.405	728.651.655	149.404.750	20,50
4	DITJEN KPI	177.112.711	0	177.112.711	100,00
5	ITJEN	325.035.100	133.799.000	191.236.100	142,93
6	DITJEN PEN	685.566.309	655.761.309	29.805.000	4,55
7	BAPPEBTI	1.476.546.995	1.378.981.995	97.565.000	7,08
8	BPPKP	1.265.652.090	1.265.652.090	0	0,00
9	DITJEN SPK	1.742.370.471	1.682.605.544	59.764.927	3,55
	Jumlah	26.685.579.268	15.310.559.767	11.375.019.501	74,30

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.

Saldo per 31 Desember 2013	15.310.559.767
Mutasi Tambah	
Pembelian	827.302.523
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	5.287.745.711
Penyelesaian Pembangunan Langsung	5.462.774.900
Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	(351)
Transfer Keluar	(138.625.680)
Reklasifikasi Keluar	(26.575.800)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(37.601.802)
Saldo per 31 Desember 2014	26.685.579.268
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2014	(526.360.506)
Nilai Buku per 31 Desember 2014	26.159.218.762

A. MUTASI TAMBAH

1. Pembelian sebesar Rp827.302.523 terdiri dari:

Satker	Nilai (Rp)
Dit. DKM dan PDN	197.824.770
Sekretariat Ditjen Perdagangan Luar Negeri	149.404.750
Set Ditjen PEN	42.114.400
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	103.565.000
Pusat Humas	199.810.901
Pusdiklat	24.662.775
Biro Perencanaan	20.350.000
BBPPEI	29.805.000
Direktorat Standardisasi	54.822.077
Balai Sertifikasi	4.942.850

2. Penyelesaian Pembangunan dengan KDP sebesar Rp5.287.745.711 terdiri dari:

- Penyelesaian renovasi gedung kantor pada satker Ditjen. KPI senilai Rp177.112.711.
- Penyelesaian renovasi Pasar Percontohan Palimanan milik pemerintah daerah oleh Disperindag Kab. Cirebon senilai Rp5.110.633.000.

3. Penyelesaian Pembangunan Langsung sebesar Rp5.462.774.900 terdiri dari:

- Penyelesaian renovasi gedung kantor pada satker Setjen Biro, Biro Perencanaan dan Itjen masing-masing senilai Rp252.823.800, Rp193.715.000, dan Rp191.236.100.
- Penyelesaian renovasi Pasar Rakyat Cikalongkulon milik pemerintah daerah oleh Disperindag Kab. Cianjur senilai Rp4.825.000.000.

B. MUTASI KURANG

1. Koreksi pencatatan nilai BMN berupa buku sebesar Rp351 pada satker Humas.

2. Transfer keluar sebesar Rp138.625.680 terdiri dari:

- Transfer keluar dari Setjen Biro sebesar Rp60.968.930 berupa aset tetap dalam renovasi gedung dan bangunan.
- Transfer keluar dari Humas sebesar Rp35.542.350 berupa aset tetap dalam renovasi gedung dan bangunan.

- c. Transfer keluar dari Set. Ditjen. PEN sebesar Rp42.114.400 berupa aset tetap dalam renovasi gedung dan bangunan.
3. Reklasifikasi Keluar monografi berdasarkan BA inventarisasi No. 002/Atdag.BKK/I/2014 sebesar 26.575.800 pada Atase Bangkok.
4. Penghentian aset dari penggunaan sebesar Rp37.601.802 terdiri dari:
 - a. Monografi pada Atase London sebesar Rp26.981.802.
 - b. Monografi pada Atase New Delhi sebesar Rp4.620.000.
 - c. Slide pada disperindag Kop. UKM Kab. Sumenep sebesar Rp6.000.000.

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
Rp65.126.618.092

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp65.126.618.092 dan Rp53.529.288.335. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) secara detail per 31 Desember 2014 per Eselon I tersaji pada Tabel 53.

Tabel 53
Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per Eselon I

No	Uraian	31-12-2014 (Rp)	31-12-2013 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	SETJEN	23.734.195.635	23.665.847.135	68.348.500	0,29
2	DITJEN PDN	41.392.422.457	29.863.441.200	11.528.981.257	38,61
	Jumlah	65.126.618.092	53.529.288.335	11.597.329.757	21,67

Penjelasan mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan sebagai berikut:

A. SEKRETARIAT JENDERAL

Kementerian Perdagangan cq Sekretariat Jenderal telah menandatangani MoU dengan PT. Pertamina (Persero) terkait pembelian tanah seluas 12.144 m² yang terletak di Jl. M.I. Ridwan Rais No. 3 Jakarta Pusat dengan nilai Rp467.544.000.000. Kontrak pembelian tanah bersifat tahun jamak (multi years) dibayarkan secara bertahap mulai dari tanggal 5 Desember 2013 sampai dengan 31 Agustus 2016 dan pembayaran kontrak tahap I di TA.2013 sebesar Rp23.475.000.000.

Nilai kapitalisasi Tanah dalam Pengerjaan per 31 Desember 2014 sebesar Rp23.665.847.135 terdiri atas:

- Pembayaran tahap I kontrak sebesar Rp23.475.000.000
- Pekerjaan penilaian properti sebesar Rp33.000.135

- Pekerjaan urugan tanah merah lahan parkir sebesar Rp56.697.000
- Pekerjaan konsultasi dan legalisasi perjanjian pelepasan hak tanah sebesar Rp44.000.000
- Honorarium panitia pelaksanaan pengadaan tanah (sebagai bagian dari nilai pembelian tanah milik PT. Pertamina oleh Kementerian Perdagangan) sebesar Rp57.150.000.

Mutasi tambah pada satker Biro Umum sebesar Rp68.348.500 merupakan nilai perencanaan pengerjaan renovasi Gedung 1 Kementerian Perdagangan.

B. DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Ditjen PDN merupakan pembangunan dan/atau revitalisasi sarana distribusi pemasaran yang dilaksanakan melalui dana tugas pembantuan dan sampai dengan 31 Desember 2014 belum selesai dilaksanakan sebesar Rp41.392.422.457 dengan rincian sebagai berikut:

No	Satuan Kerja	Nilai (Rp)
1	Dinas Koperasi UKM Perindag Kab. Bogor	9.464.949.500
2	Dinas Perindag Kab. Batang	985.445.500
3	Dinas Perindagkop Kota Lhokseumawe	2.204.130.000
4	Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Gunung Sitoli	349.752.000
5	Dinas Perindagkop dan UKM Kab. Kep.Talau	1.368.495.000
6	Dinas Koperasi UKM Perindag Kab. Tojo Una Una	4.455.861.435
7	Dinas Koperasi UKM Perindagtamben Kab. Selayar	1.770.374.800
8	Dinas Koperasi UMKM Perindag Kab. Barru	9.672.433.000
9	Dinas Perindag Prov. Maluku (TP)	3.031.541.200
10	Dinas Perindagkop Penanaman Modal Kota Kotamobagu	8.089.440.022
Jumlah		41.392.422.457

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
(Rp801.535.186.868)

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar (Rp801.535.186.868) dan (Rp741.069.474.064).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2014 tersaji pada Tabel 54.

Tabel 54
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Uraian	31-12-2014 (Rp)	31-12-2013 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan Dan Mesin	(567.690.495.995)	(530.528.537.482)	(37.161.958.513)	7,00
2	Akumulasi Penyusutan Gedung Dan Bangunan	(212.626.201.014)	(191.536.169.522)	(21.090.031.492)	11,01
3	Akumulasi Penyusutan Jalan Dan Jembatan	(1.237.741.748)	(1.094.363.210)	(143.378.538)	13,10
4	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(92.264.773)	(106.827.226)	14.562.453	(13,63)
5	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(19.362.122.832)	(17.289.192.368)	(2.072.930.464)	11,99
6	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(526.360.506)	(514.384.256)	(11.976.250)	2,33
	Jumlah	(801.535.186.868)	(741.069.474.064)	(60.465.712.804)	8,16

Sedangkan Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2014 per Eselon I tersaji pada Tabel 55.

Tabel 55
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per Eselon I

No	Uraian	31-12-2014 (Rp)	31-12-2013 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	SETJEN	(186.490.380.310)	(158.509.962.098)	(27.980.418.212)	17,65
2	DITJEN PDN	(152.309.323.197)	(113.587.024.444)	(38.722.298.753)	34,09
3	DITJEN DAGLU	(28.318.771.687)	(27.070.531.581)	(1.248.240.106)	4,61
4	DITJEN KPI	(10.202.108.441)	(10.861.032.739)	658.924.298	(6,07)
5	ITJEN	(8.181.468.055)	(7.751.701.803)	(429.766.252)	5,54
6	DITJEN PEN	(43.158.361.873)	(51.226.604.521)	8.068.242.648	(15,75)
7	BAPPEBTI	(45.753.789.719)	(55.294.581.768)	9.540.792.049	(17,25)
8	BPPKP	(45.476.738.849)	(41.983.774.358)	(3.492.964.491)	8,32
9	DITJEN SPK	(281.644.244.737)	(274.784.260.752)	(6.859.983.985)	2,50
	Jumlah	(801.535.186.868)	(741.069.474.064)	(60.465.712.804)	8,16

C.3. Piutang Jangka Panjang

Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
Rp444.184.250

C.3.1. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp444.184.250 dan Rp460.984.250.

Rangkuman Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2014 tersaji pada Tabel 56.

Tabel 56
Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

No	Uraian	31-12-2014 (Rp)	31-12-2013 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	444.184.250	460.984.250	(16.800.000)	(3,64)
	Jumlah	444.184.250	460.984.250	(16.800.000)	(3,64)

Tabel 57
Rincian TP/TGR

No	Nama TP/TGR	Jumlah Kerugian	Nilai Setoran SKTJM	Saldo 31 Desember 2014	Jangka Pendek	Jangka Panjang	Keterangan
1	Tukul Yadi	14.497.125	5.590.855	8.906.270	8.906.270	-	Macet, sejak 1997
2	Yuniarti	775.784.250	322.000.000	453.784.250	9.600.000	444.184.250	-
3	Hendro Bambang S.	127.405.059	-	127.405.059	127.405.059	-	Macet sejak 1980
4	Edi Djunaedi	194.218.927	-	194.218.927	194.218.927	-	Macet sejak 1980
	Total	1.111.905.361	327.590.855	784.314.506	340.130.256	444.184.250	

Penyisihan Piutang Tak Tertagih-
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
(Rp2.220.921)

C.3.2. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar (Rp2.220.921) dan (Rp2.304.921).

Rangkuman Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2014 tersaji pada Tabel 58.

Tabel 58
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

No	Uraian	31-12-2014 (Rp)	31-12-2013 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	(2.220.921)	(2.304.921)	84.000	(3,64)
	Jumlah	(2.220.921)	(2.304.921)	84.000	(3,64)

Saldo Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto) per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp441.963.329 dan Rp458.679.329. Rangkuman Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto) per 31 Desember 2014 tersaji pada Tabel 59.

Tabel 59
Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)

No	Uraian	31-12-2014 (Rp)	31-12-2013 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	444.184.250	460.984.250	(16.800.000)	(3,78)
2	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	(2.220.921)	(2.304.921)	84.000	(3,78)
	Jumlah	441.963.329	458.679.329	(16.716.000)	(3,78)

Rangkuman Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto) per 31 Desember 2014 per Eselon I tersaji pada Tabel 60.

Tabel 60
Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto) per Eselon I

No	Uraian	31-12-2014 (Rp)	31-12-2013 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	SETJEN	441.963.329	458.679.329	(16.716.000)	(3,64)
	Jumlah	441.963.329	458.679.329	(16.716.000)	(3,64)

Tabel 61
Rincian Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

TP/TGR	Jangka Pendek	Jangka Panjang	Kategori	Besaran Penyisihan	Penyisihan Piutang	Jangka Pendek	Jangka Panjang
Sekretariat Jenderal							
Tukul Yadi	8.906.270	-	Macet	100%	8.906.270	8.906.270	-
Yuniarti	9.600.000	444.184.250	Lancar	5 per mil	2.268.921	48.000	2.220.921
Hendro BS	127.405.059	-	Macet	100%	127.405.059	127.405.059	-
Edi Djunaedi	194.218.927	-	Macet	100%	194.218.927	194.218.927	-
Jumlah	340.130.256	444.184.250			332.799.177	330.578.256	2.220.921

Keterangan:

Penyisihan TP/TGR bagian jangka pendek dan jangka panjang dihitung secara proporsional dari nilai penyisihan total.

Nilai tagihan TP/TGR Jangka panjang - netto sebagai berikut:

TP/TGR Jangka Panjang	444.184.250
Penyisihan TP/TGR Jangka Panjang	2.220.921
TP/TGR Jangka Panjang – Netto	441.963.329

Aset Lainnya
Rp408.603.764.238

C.4. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp408.603.764.238 dan Rp207.708.975.167 yang merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Rincian Nilai Aset Lainnya pada tanggal pelaporan tersaji pada Tabel 62.

Tabel 62
Rincian Aset Lainnya

No	Uraian	31-12-2014 (Rp)	31-12-2013 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Aset Tak Berwujud	134.018.009.005	128.766.991.539	5.251.017.466	4,08
2	Aset Lain-lain	346.403.065.984	100.240.988.745	246.162.077.239	245,57
3	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	(71.817.310.751)	(21.299.005.117)	(50.518.305.634)	237,19
	Jumlah	408.603.764.238	207.708.975.167	200.894.789.071	96,72

Rangkuman Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2014 per Eselon I tersaji pada Tabel 63.

Tabel 63
Rincian Aset Lainnya Per Eselon I

No	Uraian	31-12-2014 (Rp)	31-12-2013 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	SETJEN	11.208.679.818	10.436.235.431	772.444.387	7,40
2	DITJEN PDN	157.658.823.310	90.088.549.896	67.570.273.414	75,00
3	DITJEN DAGLU	19.607.732.069	18.252.416.692	1.355.315.377	7,43
4	DITJEN KPI	581.614.000	35.750.000	545.864.000	1.526,89
5	ITJEN	881.440.500	849.901.214	31.539.286	3,71
6	DITJEN PEN	421.062.742	437.758.061	(16.695.319)	(3,81)
7	BAPPEBTI	133.546.290.924	6.419.670.400	127.126.620.524	1.980,27
8	BPPKP	13.902.946.164	17.019.312.164	(3.116.366.000)	(18,31)
9	DITJEN SPK	70.795.174.711	64.169.381.309	6.625.793.402	10,33
	Jumlah	408.603.764.238	207.708.975.167	200.894.789.071	96,72

Aset Tak Berwujud
Rp134.018.009.005

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp134.018.009.005 dan Rp128.766.991.539. Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada lingkup Kementerian Perdagangan berupa software, lisensi, hasil kajian/penelitian dan aset tak berwujud lainnya yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Adapun rincian ATB per 31 Desember 2014 tersaji pada Tabel 64.

Tabel 64
Rincian Aset Tak Berwujud

No	Uraian	31-12-2014 (Rp)	31-12-2013 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Software	78.207.985.255	39.156.607.051	39.051.378.204	99,73
2	Lisensi	1.419.698.470	1.411.588.470	8.110.000	0,57
3	Hasil Kajian/ Penelitian	31.405.945.190	31.405.945.190	0	0,00
4	Aset Tak Berwujud Lainnya	22.984.380.090	56.792.850.828	(33.808.470.738)	(59,53)
	Jumlah	134.018.009.005	128.766.991.539	5.251.017.466	4,08

Rincian ATB per 31 Desember 2014 per Eselon I tersaji pada Tabel 65.

Tabel 65
Rincian Aset tak Berwujud per Eselon I

No	Uraian	31-12-2014 (Rp)	31-12-2013 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	SETJEN	10.492.434.664	9.723.926.798	768.507.866	7,90
2	DITJEN PDN	47.048.158.280	46.094.108.680	954.049.600	2,07
3	DITJEN DAGLU	14.941.857.600	13.581.982.600	1.359.875.000	10,01
4	DITJEN KPI	581.614.000	35.750.000	545.864.000	1.526,89
5	ITJEN	701.443.500	664.373.500	37.070.000	5,58
6	DITJEN PEN	332.353.887	360.353.887	(28.000.000)	(7,77)
7	BAPPEBTI	5.948.922.400	5.019.235.400	929.687.000	18,52
8	BPPKP	8.722.126.434	8.703.316.434	18.810.000	0,22
9	DITJEN SPK	45.249.098.240	44.583.944.240	665.154.000	1,49
	Jumlah	134.018.009.005	128.766.991.539	5.251.017.466	4,08

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2013	128.766.991.539
Mutasi Tambah	
Pembelian	2.448.046.566
Pengembangan Nilai Aset	2.830.970.900
Mutasi Kurang	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(28.000.000)
Saldo per 31 Desember 2014	134.018.009.005

A. MUTASI TAMBAH

1. Pembelian sebesar Rp2.448.046.566 terdiri dari:

Nama Satker	Nilai (Rp)
Atdag KDEI	3.640.566
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	929.687.000
Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan	18.810.000
Badan Perlindungan Konsumen Nasional	53.000.000
Balai Penguji Mutu Barang	49.940.000
Balai Sertifikasi	49.500.000
Biro Perencanaan	127.050.000
BVML Regional IV (Makassar)	49.500.000
Direktorat Standardisasi	19.294.000
Dit. Bina Usaha Perdagangan	79.570.000
Ditjen Kerja Sama Perdagangan Internasional	545.864.000
PPSDMK	29.000.000
Pusat Humas	86.350.000
Pusdiklat	89.760.000
Sekretariat Ditjen Perdagangan Luar Negeri	171.875.000
Setjen Biro	145.206.000

2. Pengembangan nilai aset sebesar Rp2.830.970.900 terdiri dari:

Nama Satker	Nilai (Rp)
Pusdapi	238.614.000
Biro Umum	48.887.300
Sekretariat Ditjen PDN	336.000.000
Dit. Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan	538.479.600
Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor	1.188.000.000
Itjen	37.070.000
Direktorat Metrologi	443.920.000

B. MUTASI KURANG

1. Penghentian Aset Dari Penggunaan berupa software pada satker Ditjen. PEN senilai Rp28.000.000.

Aset Lain-Lain
Rp346.403.065.984

C.4.2. Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp346.403.065.984 dan Rp100.240.988.745 yang merupakan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan lingkup Kementerian Perdagangan. Adapun rincian aset lain-lain per 31 Desember 2014 per Eselon I tersaji pada Tabel 66.

Tabel 66
Rincian Aset Lain-lain per Eselon I

No	Uraian	31-12-2014 (Rp)	31-12-2013 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	SETJEN	4.385.111.819	3.138.746.121	1.246.365.698	39,71
2	DITJEN PDN	131.088.907.163	55.446.191.404	75.642.715.759	136,43
3	DITJEN DAGLU	5.659.644.846	4.946.841.978	712.802.868	14,41
4	DITJEN KPI	968.066.797	0	968.066.797	100,00
5	ITJEN	473.569.230	200.038.000	273.531.230	136,74
6	DITJEN PEN	990.055.604	2.454.749.106	(1.464.693.502)	(59,67)
7	BAPPEBTI	147.259.608.372	1.400.435.000	145.859.173.372	10.415,28
8	BPPKP	5.611.648.519	8.709.762.019	(3.098.113.500)	(35,57)
9	DITJEN SPK	49.966.453.634	23.944.225.117	26.022.228.517	108,68
	Jumlah	346.403.065.984	100.240.988.745	246.162.077.239	245,57

Mutasi Aset Lain-Lain per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2013	100.240.988.745
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lain	279.130.021.903
Mutasi Kurang	
Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)	(53.208.221)
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	(1.956.056.099)
Transfer Keluar (BMN yang dihentikan)	(3.137.863.500)
Hibah Keluar (BMN yang dihentikan)	(24.505.987.200)
Reklasifikasi Keluar (BMN yang dihentikan)	(6.405.243)
Koreksi Pencatatan (BMN yang dihentikan)	(581.939)
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	(3.294.932.462)
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan	(12.910.000)
Saldo per 31 Desember 2014	346.403.065.984
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2014	(71.817.310.751)
Nilai Buku per 31 Desember 2014	274.585.755.233

Penjelasan mutasi Aset Lain-Lain adalah sebagai berikut:

A. MUTASI TAMBAH

1. Mutasi tambah aset lain-lain merupakan reklasifikasi dari aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan karena alasan rusak berat dan dimaksudkan untuk dihibahkan kepada pihak lain sebesar 279.130.021.903 terdiri dari:

Nama Satker	Nilai (Rp)
SEKRETARIAT JENDERAL	
Atdag Bangkok	221.438.784
Atdag Berlin	58.640.659
Atdag Cairo	223.593.524
Atdag Canberra	82.685.635
Atdag Kuala Lumpur	19.738.390
Atdag London	340.740.236
Atdag Manila	39.874.800
Atdag New Delhi	35.938.206
Atdag Paris	48.684.282

Atdag Roma	59.788.772
Atdag Seoul	7.315.000
Atdag Tokyo	104.355.315
ITN Jenewa	82.664.498
Biro Umum	654.095.000
Pusat Humas	18.872.700
Pusdapi	663.853.500
Sub Total	2.662.279.301
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
Sekretariat Ditjen PDN	4.857.243.050
Prop. Kepulauan Riau	35.000.000
Disperindag Bangli	4.047.050.000
Dinas Perdagangan dan Pengl.Pasar Kab.Kudus	5.715.312.000
Dinas Perindag Em Kab. Pinrang	4.829.484.000
Dinas Perindagkop Kab. Dairi	849.200.000
Dinas Perindagkop Kab. Humbang Hasundutan	1.062.500.000
Dinas Perindagkop Kota Palu	7.990.585.000
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pasuruan	2.835.660.000
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumedang	2.889.476.465
Disilap. UKM & Perdagangan Kab. Mamuju	2.875.073.000
Disindagkop Kab. Tanjung Jabung Timur	979.697.000
Diskop UKM Perindag Prov. Sulawesi Barat	52.112.000
Diskop. UMKM. Perindag Prov. Sulawesi Tengah	452.667.000
Diskoperdag KAB. SUMBAWA	2.887.290.000
Diskoperdag UMKM Kab. Purwakarta	2.846.392.500
Diskoperindag Kab. Luwu	977.500.000
Diskoperindag Kab. Palopo	2.876.500.000
Diskoperindag Kab.Toba Samosir	1.697.584.000
Diskoperindag Kota Mataram	9.558.529.000
Diskopperindag & UMKM Kab. Solok	2.475.212.000
Disperdag Kab. Maluku Tengah	2.824.982.000
Disperdag Kab.Musi Banyuasin	2.883.502.000
Disperdagkop Kab. Pidie	2.868.792.000
Disperindag & ESDM Kab. Kulonprogo	4.955.000.000
Disperindag & Investasi Kota Dumai	8.796.712.455
Disperindag dan UKM D.I. Yogyakarta	6.880.000
Disperindag Kab Kepahiang	849.600.000
Disperindag Kab. Balangan	1.143.381.000
Disperindag Kab. Bone	5.719.919.000
Disperindag Kab. Lebak	2.887.884.000
Disperindag Kab.Batu Bara	3.000.000.000
Disperindag Kab.Bengkulu Utara	2.951.330.999
Disperindag Kab.Kutai Barat	846.477.000
Disperindag Kab.Lebong	849.935.000
Disperindag Kop. UKM Kab. Bantul	2.914.557.250
Disperindag Kop. UKM Kab. Bantaeng	2.878.650.000
Disperindag Kop. UKM Kab. Barito kuala	2.889.248.000
Disperindag Kop. UKM Kab. Bogor	2.854.345.000
Disperindag Kop. UKM Kab. Cianjur	2.797.023.000

Disperindag Kop. UKM Kab. Demak	5.792.953.000
Disperindag Kop. UKM Kab. Garut	2.367.931.000
Disperindag Kop. UKM Kab. Gorontalo	4.750.965.000
Disperindag Kop. UKM Kab. Gowa	2.887.793.000
Disperindag Kop. UKM Kab. Indramayu	2.870.890.000
Disperindag Kop. UKM Kab. Jepara	2.860.950.000
Disperindag Kop. UKM Kab. Jombang	2.839.273.557
Disperindag Kop. UKM Kab. Kuningan	2.360.862.000
Disperindag Kop. UKM Kab. Madiun	2.896.015.000
Disperindag Kop. UKM Kab. Majalengka	2.905.795.000
Disperindag Kop. UKM Kab. Minahasa Selatan	2.379.691.500
Disperindag Kop. UKM Kab. Nganjuk	2.879.187.000
Disperindag Kop. UKM Kab. Ngawi	2.734.964.000
Disperindag Kop. UKM Kab. Pasaman Barat	2.615.663.000
Disperindag Kop. UKM Kab. Pekalongan	2.863.800.000
Disperindag Kop. UKM Kab. Pidie jaya	2.559.487.600
Disperindag Kop. UKM Kab. Probolinggo	5.625.781.000
Disperindag Kop. UKM Kab. Sampang	5.805.599.000
Disperindag Kop. UKM Kab. Sidenreng	2.794.289.000
Disperindag Kop. UKM Kab. Subang	2.710.329.000
Disperindag Kop. UKM Kab. Sumenep	5.057.397.500
Disperindag Kop. UKM Kab. Takalar	2.392.759.000
Disperindag Kop. UKM Kab. Tanah datar	2.596.470.000
Disperindag Kop. UMKM Kab. Banjarnegara	2.921.989.000
Disperindag Kota Bengkulu	9.894.932.455
Disperindag Kota Denpasar	7.132.959.600
Disperindag Kota Pagar Alam	1.247.900.000
Disperindag Kota Surakarta	4.824.529.000
Disperindag Kab.Karo	1.245.000.000
Disperindag Prov. Papua	7.453.115.000
Disperindag Prov. Bangka Belitung	167.000.000
Disperindag Prov. Jawa Barat	68.660.000
Disperindag Prov. Kalimantan Barat	24.925.000
Disperindag Prov. Kalimantan Selatan	103.025.000
Disperindag Prov. NTB	94.185.000
Disperindag Prov. Papua	1.056.035.000
Disperindag Prov. Riau	96.950.000
Disperindag Prov. Sulawesi Tenggara	71.500.000
Disperindag Prov. Sumatera Selatan	108.075.000
Disperindag Prov. Bengkulu	50.060.000
Disperindagem Kab. Pinrang	2.881.721.000
Disperindagkop D.I. Yogyakarta	4.271.680.000
Disperindagkop dan UMKM Prov. Kalimantan Timur	121.945.000
Disperindagkop Kab. Bengkayang	838.500.000
Disperindagkop Prov. Jawa Timur	30.300.000
Disperindagkop UMKM Kab. Jayapura	499.602.000
Disperindagtamben Kab. Grobogan	2.735.950.000
Dit. Logistik & Sarana Distribusi	69.057.400
Sub Total	241.266.726.331

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI	
Sekretariat Ditjen Perdagangan Luar Negeri	571.407.000
Direktorat Pengamanan Perdagangan	141.395.868
Sub Total	712.802.868
DIREKTORAT JENDERAL KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL	
Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional	1.793.146.836
Sub Total	1.793.146.836
INSPEKTORAT JENDERAL	
Inspektorat Jenderal	405.631.230
Sub Total	405.631.230
DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL	
Set Ditjen PEN	244.265.000
BBPPEI	135.668.000
Sub Total	379.933.000
BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI	
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	4.850.850.000
Sub Total	4.850.850.000
Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan	914.417.820
Sub Total	914.417.820
DIREKTORAT JENDERAL STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	201.510.000
Badan Perlindungan Konsumen Nasional	235.640.000
Balai Penguji Mutu Barang	170.788.940
Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional II	13.290.000
Direktorat Metrologi	18.008.251.300
Direktorat Pengembangan Mutu Barang	6.996.807.300
Direktorat Standardisasi	512.946.977
BSML Regional III (Banjarmasin)	5.000.000
Sub Total	26.144.234.517
Total	279.130.021.903

B. MUTASI KURANG

1. Transaksi normalisasi BMN (BMN yang dihentikan) sebesar Rp53.208.221 terdiri dari:

Satker	Nilai (Rp)
Biro Umum	47.190.000
Atdag New Delhi	148.828
Atdag Den Haag	123.393
Direktorat Pengembangan Mutu Barang	5.746.000

2. Penghapusan (BMN yang dihentikan) sebesar Rp1.956.056.099 terdiri dari:

Satker	Nilai (Rp)
Pusat Humas	18.872.700
Pusdiklat	32.900.000
Sekretariat Ditjen PDN	109.700.000
Ditjen Kerja Sama Perdagangan Internasional	825.080.039
Set Ditjen PEN	94.835.540
Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan	874.667.820

3. Transfer Keluar (BMN yang dihentikan) sebesar (3.137.863.500) pada Badan Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan berupa software.

4. Mutasi kurang karena hibah keluar (BMN yang dihentikan) berupa bangunan sarana distribusi dan pemasaran yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan telah dihapuskan dari Daftar Barang Milik Negara berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor 758/M-DAG/KEP/6/2014 tanggal 27 Juni 2014 sebesar Rp24.505.987.200 dengan rincian berikut:

Satker	Nilai (Rp)
Disperindag Prov. Jawa Barat	68.660.000
Disperindagkop Kota Pekalongan	1.643.400.000
Disperindagkop Prov. Jawa Timur	30.300.000
Disperindagkop UKM Kab. Aceh Besar	2.154.851.200
Disperindag Kota Pematang Siantar	9.588.369.000
Disperindagkop dan UMKM Prov. Kalimantan Timur	121.945.000
Dinas Perindagkop UKM Kota Pare Pare	2.492.777.000
Disperindag Prov. Sulawesi Tenggara	71.500.000
Bangli	4.047.050.000
Disperindag Kab.Lebong	849.935.000
Disperindag Kota Ternate	1.982.200.000
Diskopperindag Invesda Kab. Pohuwato	1.455.000.000

5. Reklasifikasi Keluar (BMN yang dihentikan sebesar Rp6.405.243 terdiri dari:

- a. Atdag Roma sebesar 6.643 berupa CPU (Peralatan Mainframe).
- b. Atdag Bangkok sebesar 6.398.600 berupa monografi.

6. Koreksi Pencatatan (BMN yang dihentikan) pada atase Tokyo sebesar Rp581.939.

7. Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola sebesar Rp3.294.932.462 terdiri dari:

Satker	Nilai (Rp)
Biro Umum	654.095.000
Pusdapi	655.596.500
Inspektorat Jenderal	132.100.000
Set Ditjen PEN	1.433.737.962
BBPPEI	303.203.000
Sekretariat Direktorat Jenderal SPK	116.200.000

8. Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan sebesar Rp12.910.000 terdiri dari:

- Penggunaan kembali Audio visual pada Direktorat Pengembangan Mutu Barang sebesar Rp60.000.
- Penggunaan kembali Tensile Strength Tester pada BBPPEI sebesar Rp12.850.000.

Akumulasi
Penyusutan/
Amortisasi Aset
Lainnya
(Rp71.817.310.751)

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar (Rp71.817.310.751) dan (Rp21.299.005.117) yang merupakan akumulasi penyusutan asset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan lingkup Kementerian Perdagangan. Adapun rincian akumulasi penyusutan/amortisasi asset lainnya per 31 Desember 2014 per Eselon I tersaji pada Tabel 67.

Tabel 67
Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Asset Lainnya per Eselon I

No	Uraian	31-12-2014 (Rp)	31-12-2013 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	SETJEN	(3.668.866.665)	(2.426.437.488)	(1.242.429.177)	51,20
2	DITJEN PDN	(20.478.242.133)	(11.451.750.188)	(9.026.491.945)	78,82
3	DITJEN DAGLU	(993.770.377)	(276.407.886)	(717.362.491)	259,53
4	DITJEN KPI	(968.066.797)	0	(968.066.797)	100,00
5	ITJEN	(293.572.230)	(14.510.286)	(279.061.944)	1.923,20
6	DITJEN PEN	(901.346.749)	(2.377.344.932)	1.475.998.183	(62,09)
7	BAPPEBTI	(19.662.239.848)	0	(19.662.239.848)	100,00
8	BPPKP	(430.828.789)	(393.766.289)	(37.062.500)	9,41
9	DITJEN SPK	(24.420.377.163)	(4.358.788.048)	(20.061.589.115)	460,26
	Jumlah	(71.817.310.751)	(21.299.005.117)	(50.518.305.634)	237,19

KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka
Pendek
Rp16.972.037.926

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp16.972.037.926 dan Rp47.816.331.141.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Rincian Kewajiban Jangka Pendek tersaji pada Tabel 68.

Tabel 68
Rincian Kewajiban Jangka Pendek

No	Uraian	31-12-2014 (Rp)	31-12-2013 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Utang kepada Pihak Ketiga	8.728.950.712	25.847.671.544	(17.118.720.832)	(66,23)
2	Pendapatan Diterima Dimuka	348.778.993	207.709.951	141.069.042	67,92
3	Uang Muka dari KPPN	4.465.321.851	7.310.288.374	(2.844.966.523)	(38,92)
4	Pendapatan Yang Ditangguhkan	3.352.634.370	14.450.661.272	(11.098.026.902)	(76,80)
5	Utang Jangka Pendek Lainnya	76.352.000	0	76.352.000	100,00
	Jumlah	16.972.037.926	47.816.331.141	(30.844.293.215)	(64,51)

Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp8.728.950.712

C.5.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp8.728.950.712 dan Rp25.847.671.544.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang Pihak Ketiga Kementerian Perdagangan per tanggal pelaporan tersaji pada Tabel 69.

Tabel 69
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	31-12-2014 (Rp)	31-12-2013 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar	173.131.168	165.730.000	7.401.168	4,47
2	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar	175.314.551	169.834.546	5.480.005	3,23
3	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	8.380.504.993	25.512.106.998	(17.131.602.005)	(67,15)
	Jumlah	8.728.950.712	25.847.671.544	(17.118.720.832)	(66,23)

Rincian Utang Pihak Ketiga Kementerian Perdagangan per Eselon I per tanggal pelaporan tersaji pada Tabel 70.

Tabel 70
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per Eselon I

No	Uraian	31-12-2014 (Rp)	31-12-2013 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	SETJEN	7.801.382.737	22.486.298.495	(14.684.915.758)	(65,31)
2	DITJEN PDN	52.172.700	10.132.515	42.040.185	414,90
3	DITJEN DAGLU	7.986.749	3.935.661	4.051.088	102,93
4	DITJEN KPI	0	2.127.538.421	(2.127.538.421)	(100,00)
5	ITJEN	37.292.641	0	37.292.641	100,00
6	BPPKP	59.290.450	1.039.012.941	(979.722.491)	(94,29)
7	DITJEN SPK	770.825.435	180.753.511	590.071.924	326,45
	Jumlah	8.728.950.712	25.847.671.544	(17.118.720.832)	(66,23)

Pendapatan
Diterima Dimuka
Rp348.778.993

C.5.2. Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp348.778.993 dan Rp207.709.951.

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga tersaji pada Tabel 71.

Tabel 71
Rincian Pendapatan Diterima di Muka

No	Uraian	31-12-2014 (Rp)	31-12-2013 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	344.122.151	203.053.109	141.069.042	69,47
2	Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka	4.656.842	4.656.842	0	0,00
	Jumlah	348.778.993	207.709.951	141.069.042	67,92

Adapun Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga per Eselon I tersaji pada Tabel 72.

Tabel 72
Rincian Pendapatan Diterima di Muka per Eselon I

No	Uraian	31-12-2014 (Rp)	31-12-2013 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	SETJEN	32.774.349	164.859.002	(132.084.653)	(80,12)
2	DITJEN PEN	0	23.185.949	(23.185.949)	(100,00)
3	BAPPEBTI	7.100.000	7.100.000	0	0,00
4	DITJEN SPK	308.904.644	12.565.000	296.339.644	2.358,45
	Jumlah	348.778.993	207.709.951	141.069.042	67,92

Uang Muka dari
KPPN
Rp4.465.321.851

C.5.3. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp4.465.321.851 dan Rp7.310.288.374. Adapun rincian Uang Muka dari KPPN per Eselon I per 31 Desember 2014 tersaji pada Tabel 73.

Tabel 73
Rincian Uang Muka dari KPPN per Eselon I

No	Uraian	31-12-2014 (Rp)	31-12-2013 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	SETJEN	2.713.408.944	3.925.508.816	(1.212.099.872)	(30,88)
2	DITJEN PDN	804.741.524	1.015.692.111	(210.950.587)	(20,77)
3	DITJEN DAGLU	90.232.277	9.399.500	80.832.777	859,97
4	DITJEN PEN	742.440.606	1.894.781.783	(1.152.341.177)	(60,82)
5	DITJEN SPK	114.498.500	464.906.164	(350.407.664)	(75,37)
	Jumlah	4.465.321.851	7.310.288.374	(2.844.966.523)	(38,92)

Pendapatan Yang
Ditangguhkan
Rp3.352.634.370

C.5.4. Pendapatan Yang Ditangguhkan

Saldo Pendapatan Yang Ditangguhkan per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp3.352.634.370 dan Rp14.450.661.272. Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan Pendapatan Negara yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan PNBPN, pengembalian belanja, serta pungutan/potongan pajak yang belum disetorkan ke kas negara pada tanggal 31 Desember 2014. Rincian Pendapatan Yang Ditangguhkan per Eselon I tersaji pada Tabel 74.

Tabel 74
Rincian Pendapatan Yang Ditangguhkan per Eselon I

No	Uraian	31-12-2014 (Rp)	31-12-2013 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	SETJEN	3.297.013.482	13.533.831.256	(10.236.817.774)	(75,64)
2	DITJEN PDN	(485.000)	146.947.454	(147.432.454)	(100,33)
3	DITJEN DAGLU	0	37.800.000	(37.800.000)	(100,00)
4	DITJEN KPI	0	625.576.579	(625.576.579)	(100,00)
5	ITJEN	0	58.005.011	(58.005.011)	(100,00)
6	BPPKP	12.088.050	20.216.700	(8.128.650)	(40,21)
7	DITJEN SPK	44.017.838	28.284.272	15.733.566	55,63
	Jumlah	3.352.634.370	14.450.661.272	(11.098.026.902)	(76,80)

Utang Jangka
Pendek Lainnya
Rp76.352.000

C.5.5. Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp76.352.000 dan Rp0. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per Eselon I per 31 Desember 2014 tersaji pada Tabel 75.

Tabel 75
Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per Eselon I

No	Uraian	31-12-2014 (Rp)	31-12-2013 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	DITJEN KPI	76.352.000	0	76.352.000	100,00
	Jumlah	76.352.000	0	76.352.000	100,00

Utang Jangka Pendek Lainnya pada Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional sebesar Rp76.352.000 adalah Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor per 31 Desember 2014.

EKUITAS

Ekuitas Dana Lancar
Rp30.537.217.837

C.6. Ekuitas Dana Lancar

Saldo Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp30.537.217.837 dan Rp39.378.133.636. Adapun rincian Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2014 tersaji pada Tabel 76.

Tabel 76
Rincian Ekuitas Dana Lancar

No	Uraian	31-12-2014 (Rp)	31-12-2013 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Cadangan Piutang	75.767.255	740.169.902	(664.402.647)	(89,76)
2	Cadangan Persediaan	8.259.474.482	13.396.063.435	(5.136.588.953)	(38,34)
3	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	(151.340.768)	(131.068.007)	(20.272.761)	15,47
4	Barang/Jasa yang Harus Diterima	22.702.095.861	25.580.678.257	(2.878.582.396)	(11,25)
5	Barang/Jasa Yang Harus Diserahkan	(348.778.993)	(207.709.951)	(141.069.042)	67,92
	Jumlah	30.537.217.837	39.378.133.636	(8.840.915.799)	(22,45)

Rincian Ekuitas Dana Lancar per Eselon I per 31 Desember 2014 tersaji pada Tabel 77.

Tabel 77
Rincian Ekuitas Dana Lancar per Eselon I

No	Uraian	31-12-2014 (Rp)	31-12-2013 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	SETJEN	21.633.469.579	25.566.677.157	(3.933.207.578)	(15,38)
2	DITJEN PDN	2.841.179.534	2.491.473.857	349.705.677	14,04
3	DITJEN DAGLU	1.216.956.770	1.048.030.772	168.925.998	16,12
4	DITJEN KPI	5.460.600	6.132.000	(671.400)	(10,95)
5	ITJEN	15.809.797	19.103.871	(3.294.074)	(17,24)
6	DITJEN PEN	2.878.771.966	2.371.189.978	507.581.988	21,41
7	BAPPEBTI	653.506.993	6.837.142.675	(6.183.635.682)	(90,44)
8	BPPKP	403.337.400	342.536.190	60.801.210	17,75
9	DITJEN SPK	888.725.198	695.847.136	192.878.062	27,72
	Jumlah	30.537.217.837	39.378.133.636	(8.840.915.799)	(22,45)

Cadangan Piutang
Rp75.767.255

C.6.1. Cadangan Piutang

Saldo Cadangan Piutang per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp75.767.255 dan Rp740.169.902, merupakan jumlah ekuitas dana lancar Kementerian Perdagangan dalam bentuk piutang setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih. Adapun rincian Cadangan Piutang per Eselon I per 31 Desember 2014 tersaji pada Tabel 78.

Tabel 78
Rincian Cadangan Piutang per Eselon I

No	Uraian	31-12-2014 (Rp)	31-12-2013 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	SETJEN	9.552.000	4.776.000	4.776.000	100,00
2	DITJEN PDN	0	482.787.497	(482.787.497)	(100,00)
3	BAPPEBTI	36.516.500	66.704.000	(30.187.500)	(45,26)
4	DITJEN SPK	29.698.755	185.902.405	(156.203.650)	(84,02)
	Jumlah	75.767.255	740.169.902	(664.402.647)	(89,76)

Cadangan
Persediaan
Rp8.259.474.482

C.6.2. Cadangan Persediaan

Saldo Cadangan Persediaan per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp8.259.474.482 dan Rp13.396.063.435, merupakan jumlah ekuitas dana lancar Kementerian Perdagangan dalam bentuk persediaan. Adapun rincian Cadangan Persediaan per Eselon I per 31 Desember 2014 tersaji pada Tabel 79.

Tabel 79
Rincian Cadangan Persediaan per Eselon I

No	Uraian	31-12-2014 (Rp)	31-12-2013 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	SETJEN	1.170.447.928	1.529.041.494	(358.593.566)	(23,45)
2	DITJEN PDN	2.841.179.534	2.008.686.360	832.493.174	41,44
3	DITJEN DAGLU	1.224.943.519	1.051.966.433	172.977.086	16,44
4	DITJEN KPI	5.460.600	6.132.000	(671.400)	(10,95)
5	ITJEN	17.179.888	19.103.871	(1.923.983)	(10,07)
6	DITJEN PEN	684.693.748	1.013.527.670	(328.833.922)	(32,44)
7	BAPPEBTI	624.090.493	6.777.538.675	(6.153.448.182)	(90,79)
8	BPPKP	403.337.400	342.536.190	60.801.210	17,75
9	DITJEN SPK	1.288.141.372	647.530.742	640.610.630	98,93
	Jumlah	8.259.474.482	13.396.063.435	(5.136.588.953)	(38,34)

Dana yang Harus
Disediakan untuk
Pembayaran Utang
Jangka Pendek
(Rp151.340.768)

C.6.3. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

Saldo Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar (Rp151.340.768) dan (Rp131.068.007). Perkiraan tersebut merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Adapun rincian Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran

Utang Jangka Pendek per Eselon I per 31 Desember 2014 tersaji pada Tabel 80.

Tabel 80
Rincian Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek per Eselon I

No	Uraian	31-12-2014 (Rp)	31-12-2013 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	SETJEN	(21.773.643)	(2.111.335)	(19.662.308)	931,27
2	DITJEN DAGLU	(7.986.749)	(3.935.661)	(4.051.088)	102,93
3	ITJEN	(1.370.091)	0	(1.370.091)	100,00
4	DITJEN SPK	(120.210.285)	(125.021.011)	4.810.726	(3,85)
	Jumlah	(151.340.768)	(131.068.007)	(20.272.761)	15,47

Barang/Jasa yang
Harus Diterima
Rp22.702.095.861

C.6.4. Barang/Jasa yang Harus Diterima

Saldo Barang/jasa Yang Harus Diterima per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp22.702.095.861 dan Rp25.580.678.257. Perkiraan tersebut merupakan ekuitas dana lancar berupa barang/jasa yang harus diterima dari pihak lain. Adapun rincian Barang/Jasa yang Harus Diterima per Eselon I per 31 Desember 2014 tersaji pada Tabel 81.

Tabel 81
Rincian Barang/Jasa yang Harus Diterima per Eselon I

No	Uraian	31-12-2014 (Rp)	31-12-2013 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	SETJEN	20.508.017.643	24.199.830.000	(3.691.812.357)	(15,26)
2	DITJEN PEN	2.194.078.218	1.380.848.257	813.229.961	58,89
	Jumlah	22.702.095.861	25.580.678.257	(2.878.582.396)	(11,25)

Barang/Jasa yang
Harus Diserahkan
(Rp348.778.993)

C.6.5. Barang/Jasa yang Harus Diserahkan

Saldo Barang/jasa Yang Harus Diserahkan per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar (Rp348.778.993) dan (Rp207.709.951). Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan merupakan ekuitas dana lancar berupa barang/jasa yang harus diserahkan kepada pihak lain. Adapun rincian Barang/Jasa yang Harus Diserahkan per Eselon I per 31 Desember 2014 tersaji pada Tabel 82.

Tabel 82
Rincian Barang/Jasa yang Harus Diserahkan per Eselon I

No	Uraian	31-12-2014 (Rp)	31-12-2013 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	SETJEN	(32.774.349)	(164.859.002)	132.084.653	(80,12)
2	DITJEN PEN	0	(23.185.949)	23.185.949	(100,00)
3	BAPPEBTI	(7.100.000)	(7.100.000)	0	0,00
4	DITJEN SPK	(308.904.644)	(12.565.000)	(296.339.644)	2.358,45
	Jumlah	(348.778.993)	(207.709.951)	(141.069.042)	67,92

Ekuitas Dana

Investasi

Rp4.193.641.879.008

C.7. Ekuitas Dana Investasi

Saldo Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp4.193.641.879.008 dan Rp4.063.431.625.195 . Adapun rincian Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 tersaji pada Tabel 83.

Tabel 83
Rincian Ekuitas Dana Investasi

No	Uraian	31-12-2014 (Rp)	31-12-2013 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	3.784.596.151.441	3.855.263.970.699	(70.667.819.258)	(1,83)
2	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	409.045.727.567	208.167.654.496	200.878.073.071	96,50
	Jumlah	4.193.641.879.008	4.063.431.625.195	130.210.253.813	3,20

Rincian Ekuitas Dana Investasi per Eselon I per 31 Desember 2014 tersaji pada Tabel 84.

Tabel 84
Rincian Ekuitas Dana Investasi per Eselon I

No	Uraian	31-12-2014 (Rp)	31-12-2013 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	SETJEN	1.040.649.032.843	1.052.482.058.818	(11.833.025.975)	(1,12)
2	DITJEN PDN	2.414.972.992.690	2.262.047.498.697	152.925.493.993	6,76
3	DITJEN DAGLU	30.927.014.670	29.746.170.517	1.180.844.153	3,97
4	DITJEN KPI	4.816.134.553	2.870.912.980	1.945.221.573	67,76
5	ITJEN	2.983.725.319	3.279.447.415	(295.722.096)	(9,02)
6	DITJEN PEN	206.230.873.735	197.123.973.544	9.106.900.191	4,62
7	BAPPEBTI	159.159.902.598	160.524.474.637	(1.364.572.039)	(0,85)
8	BPPKP	23.836.535.683	25.404.942.894	(1.568.407.211)	(6,17)
9	DITJEN SPK	310.065.666.917	329.952.145.693	(19.886.478.776)	(6,03)
	Jumlah	4.193.641.879.008	4.063.431.625.195	130.210.253.813	3,20

Diinvestasikan dalam Aset Tetap

Rp3.784.596.151.441

C.7.1. Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Saldo Diinvestasikan Dalam Aset Tetap per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp3.784.596.151.441 dan Rp3.855.263.970.699. Diinvestasikan dalam Aset Tetap merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Tetap. Adapun rincian Diinvestasikan Dalam Aset Tetap per 31 Desember 2014 tersaji pada Tabel 85.

Tabel 85
Rincian Diinvestasikan Dalam Aset Tetap per Eselon I

No	Uraian	31-12-2014 (Rp)	31-12-2013 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	SETJEN	1.028.998.389.696	1.041.587.144.058	(12.588.754.362)	(1,21)
2	DITJEN PDN	2.257.314.169.380	2.171.958.948.801	85.355.220.579	3,93
3	DITJEN DAGLU	11.319.282.601	11.493.753.825	(174.471.224)	(1,52)
4	DITJEN KPI	4.234.520.553	2.835.162.980	1.399.357.573	49,36
5	ITJEN	2.102.284.819	2.429.546.201	(327.261.382)	(13,47)
6	DITJEN PEN	205.809.810.993	196.686.215.483	9.123.595.510	4,64
7	BAPPEBTI	25.613.611.674	154.104.804.237	(128.491.192.563)	(83,38)
8	BPPKP	9.933.589.519	8.385.630.730	1.547.958.789	18,46
9	DITJEN SPK	239.270.492.206	265.782.764.384	(26.512.272.178)	(9,98)
	Jumlah	3.784.596.151.441	3.855.263.970.699	(70.667.819.258)	(1,83)

Diinvestasikan
dalam Aset Lainnya
Rp409.045.727.567

C.7.2. Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

Saldo Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp409.045.727.567 dan Rp208.167.654.496. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Lainnya. Adapun rincian Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2014 tersaji pada Tabel 86.

Tabel 86
Rincian Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya per Eselon I

No	Uraian	31-12-2014 (Rp)	31-12-2013 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	SETJEN	11.650.643.147	10.894.914.760	755.728.387	6,94
2	DITJEN PDN	157.658.823.310	90.088.549.896	67.570.273.414	75,00
3	DITJEN DAGLU	19.607.732.069	18.252.416.692	1.355.315.377	7,43
4	DITJEN KPI	581.614.000	35.750.000	545.864.000	1.526,89
5	ITJEN	881.440.500	849.901.214	31.539.286	3,71
6	DITJEN PEN	421.062.742	437.758.061	(16.695.319)	(3,81)
7	BAPPEBTI	133.546.290.924	6.419.670.400	127.126.620.524	1.980,27
8	BPPKP	13.902.946.164	17.019.312.164	(3.116.366.000)	(18,31)
9	DITJEN SPK	70.795.174.711	64.169.381.309	6.625.793.402	10,33
	Jumlah	409.045.727.567	208.167.654.496	200.878.073.071	96,50

D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

D.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

1. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 terdapat tiga posisi Atase Perdagangan yang kosong antara lain :
 - a. Atase Perdagangan Canberra
 - b. Atase Perdagangan Beijing
 - c. Konsuldag Hongkong.

2. Sisa Dana Tunjangan Kinerja bulan November dan Desember 2014 yang disetorkan ke Kas Negara tanggal 27 Januari 2015 sebesar Rp681.882.648 dengan rincian Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebagai berikut:
 - a. Pengembalian sebesar Rp378.616.646 dengan NTPN: 0803 1107 1303 0806
 - b. Pengembalian sebesar Rp109.763.194 dengan NTPN: 0612 0909 0411 1512
 - c. Pengembalian sebesar Rp130.131.755 dengan NTPN: 0412 1506 1400 0105
 - d. Pengembalian sebesar Rp11.436.551 dengan NTPN: 1102 1207 1309 0903
 - e. Pengembalian sebesar Rp51.934.502 dengan NTPN: 0704 1206 1101 0807.

3. Tahun 2014 terdapat **potensi** Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) sebesar **Rp1.059.673.000** beserta dendanya kepada 10 orang penerima beasiswa Pascasarjana (S2) dikarenakan kelalaiannya sehingga tidak mendapatkan hasil yang sewajarnya dalam waktu yang telah ditetapkan. Nilai tersebut belum diakui sebagai Tagihan Tuntutan Ganti Rugi dikarenakan belum diterbitkan (dalam proses penerbitan) Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

4. Satker Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang menginduk pada Eselon I Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (Ditjen SPK) pada tahun 2015 akan berpindah induk pada Eselon I Sekretariat Jenderal.

D.2. Pengungkapan Lain-Lain

1. Pada tanggal 27 Oktober 2014 Bapak Rachmat Gobel dilantik sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia menggantikan Bapak Muhammad Lutfi.

2. Satker Biro Umum Sekretariat Jenderal tidak dapat mencairkan anggaran sebesar Rp72.400.000.000, yang berdampak terhadap realisasi anggaran Kementerian Perdagangan TA 2014. Anggaran sebesar Rp72.400.000.000 semula diperuntukkan bagi kelanjutan pembayaran pengadaan tanah di Jalan M.I. Ridwan Rais No. 3 yang jika dilihat dari kronologisnya TA 2014 merupakan tahun kedua Biro Umum mengawal proses pengadaan tanah dimaksud. Anggaran ini tidak dapat dicairkan sampai dengan batas akhir pengajuan pencairan anggaran karena belum mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dengan alasan **moratorium** berdasarkan Surat Nomor: S-2585/AG/2014 tanggal 24 Desember 2014 yang menyatakan bahwa kegiatan pengadaan tanah TA 2014 pada Kantor Pusat Kementerian Perdagangan agar tidak direalisasikan anggarannya dengan pertimbangan arahan Presiden tentang Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga.
Berikut kronologis proses pengadaan tanah di Jalan M.I. Ridwan Rais No.3 Jakarta:
 - a. Setelah Gedung Utama Kementerian Perdagangan selesai dibangun dan mulai dipergunakan pada bulan Juni 2008, praktis Kementerian Perdagangan tidak lagi memiliki lahan yang representatif untuk parkir kendaraan dan kegiatan kedinasan Kementerian Perdagangan lainnya seperti upacara bendera.
 - b. Menteri Perdagangan mengirimkan surat dinas kepada Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Nomor: 723/M-DAG/SD/4/2012 tanggal 30 April 2012 hal Permintaan Dukungan Program dan Pembiayaan, khususnya tambahan anggaran untuk pengadaan tanah milik PT. Pertamina.
 - c. Penandatanganan MOU/Nota Kesepahaman antara Kementerian Perdagangan dengan PT. Pertamina tentang Langkah Persiapan Pelaksanaan Jual Beli Aktiva Tetap PT. Pertamina oleh Kementerian Perdagangan, Nomor Kementerian Perdagangan 1373/SJ-DAG/SD/

- 12/2012, Nomor PT. Pertamina 030/I00000/2012-S0 tanggal 20 Desember 2012.
- d. Penandatanganan Perjanjian Perikatan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 025/I00000/2013-S0 dan Nomor: 1365/SJ-DAG/SD/1/2013 pada tanggal 5 Desember 2013 oleh PT. Pertamina yang diwakili oleh Direktur Umum dan Kementerian Perdagangan yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal.
 - e. Pelaksanaan Pembayaran Tahap I sebesar Rp23.475.000.000 dengan dokumen SP2D Nomor: 555246H/018/110 tanggal 12 Desember 2013.
 - f. Penandatanganan Addendum Kesatu atas Perjanjian Pengikatan dan Pelepasan Hak atas Tanah antara PT. Pertamina dan Kementerian Perdagangan, Nomor Kementerian Perdagangan 278/SJ-DAG/SD/03/2014, Nomor PT. Pertamina ADD-02/I00000/2014-S0 tanggal 10 Maret 2014 (Persetujuan Pembayaran Tahap Kedua sebesar Rp72.400.000.000).
 - g. Biro Umum mengajukan pencairan pembayaran tahap kedua sebesar Rp72.400.000.000 ke KPPN Jakarta IV dengan SPM Nomor: 00283/447362/SPM-LS/3/2014 tanggal 28 Maret 2014.
 - h. Kepala KPPN Jakarta VI menindaklanjuti dengan surat Nomor: S-1385/WPB.12/KP.175/2014 perihal Permohonan Tindak Lanjut SPM (penundaan pembayaran).
 - i. Rapat antara Kementerian Perdagangan dengan Ditjen Anggaran dan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Perdagangan, tanggal 7 Mei 2014 bertempat di kantor Kementerian Perdagangan, hal pembahasan pengadaan tanah khususnya pencairan tahap kedua.
 - j. Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan mengirimkan surat kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Nomor: S-839/AG/2014 tanggal 9 Mei 2014 perihal Tindak Lanjut Catatan Pembahasan Trilateral Meeting Kegiatan Pengadaan Tanah Kementerian Perdagangan.
 - k. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan mengirimkan surat dinas Nomor: 89/SJ-DAG/SD/05/2014 tanggal 26 Mei 2014 kepada Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian BPKP hal Tindak Lanjut Catatan Trilateral Meeting Kegiatan Pengadaan Tanah Kementerian Perdagangan.

- l. Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian BPKP menindaklanjuti dengan mengirimkan surat Nomor: S-351/D1/03/2014 tanggal 3 Juni 2014 kepada Kepala Biro Umum, perihal Audit atas Kegiatan Pengadaan Tanah pada Kantor Pusat Kementerian Perdagangan TA 2014.
- m. Menteri Perdagangan a.n. Menteri Keuangan menindaklanjuti dengan mengirimkan surat Nomor: S-93/MK.2/2014 tanggal 19 September 2014 hal Permohonan Persetujuan Pembayaran Tahun Jamak Kementerian Perdagangan.
- n. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan mengirimkan surat dinas kepada Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 1103/SJ-DAG/10/2014 tanggal 16 Oktober 2014 hal Rencana Pengadaan Tanah untuk Kementerian Perdagangan.
- o. Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menindaklanjuti dengan surat Nomor: 6145/D4/11/2014 tanggal 13 November 2014 hal Klarifikasi Program/ Kegiatan Pengadaan Tanah Kementerian Perdagangan.
- p. Perjanjian Pengikatan Pelepasan Hak Atas Tanah antara PT. Pertamina (Persero) dengan Kementerian Perdagangan di hadapan Notaris Lenny Janis Ishak SH Nomor 41 tanggal 27 November 2014.
- q. Pelepasan Hak Pertama Nomor 42 tanggal 27 November 2014.
- r. Pelepasan Hak Kedua Nomor 43 tanggal 27 November 2014.
- s. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan mengirimkan surat dinas kepada Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Nomor: 1393/SJ-DAG/SD/12/2014 tanggal 9 Desember 2014 hal Permohonan Persetujuan Penggunaan Alokasi Anggaran Pengadaan Tanah Tahun 2014.
- t. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan mengirimkan tindak lanjut berupa surat dinas Nomor: S-25885/AG/2014 tanggal 24 Desember 2014 yang menyatakan bahwa kegiatan pengadaan tanah TA 2014 pada Kantor Pusat Kementerian Perdagangan agar tidak direalisasikan anggarannya dengan pertimbangan arahan Presiden tentang Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga.

3. Kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan masih diblokir sebesar Rp82.000.000.000 untuk 13 daerah pembangunan fisik pasar sebelum DIPA terbit yaitu:
 - a. DIPA tanggal 18 September 2014 sebesar Rp60.500.000.000, terdiri dari:
 - 1) Dinas Koperindag Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp9.500.000.000
 - 2) Disperindag Kabupaten Tegal sebesar Rp7.500.000.000
 - 3) Disperindag Kabupaten Batang sebesar Rp6.000.000.000
 - 4) Disperindagkop dan UKM dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam sebesar Rp6.000.000.000
 - 5) Diskoperindag Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar Rp8.000.000.000
 - 6) Disperindag Kabupaten Minahasa sebesar Rp7.000.000.000
 - 7) Disperindag Kabupaten Parigi Moutong sebesar Rp9.000.000.000
 - 8) Disperindag dan Penanaman Modal Kabupaten Sinjai sebesar Rp7.500.000.000.
 - b. DIPA tanggal 31 Oktober 2014 sebesar Rp21.500.000.000, terdiri dari:
 - 1) Diskoperindag, Energi dan SDM Kabupaten Gunung Kidul sebesar Rp3.500.000.000
 - 2) Disperindag dan ESDM Kabupaten Kulonprogo sebesar Rp5.000.000.000
 - 3) Disperindag dan Pasar Kabupaten Pelalawan sebesar Rp5.000.000.000
 - 4) Disperindag Kabupaten Kolaka Utara sebesar Rp5.000.000.000
 - 5) Disperindagkop Kabupaten Purbalingga sebesar Rp3.000.000.000.
4. Terdapat 20 daerah menyatakan tidak sanggup melaksanakan pekerjaan pembangunan fisik pasar setelah DIPA petikan terbit dengan nilai total sebesar Rp120.000.000.000 yaitu:
 - a. DIPA tanggal 18 September 2014 sebesar Rp38.500.000.000, terdiri dari:
 - 1) Disperindag Provinsi Jambi sebesar Rp12.000.000.000
 - 2) Disperindag Kabupaten Banjar sebesar Rp10.000.000.000

- 3) Diskop UKM Perindag Kabupaten Penajam Paser sebesar Rp7.500.000.000
 - 4) Disperindag Kabupaten Paniai sebesar Rp9.000.000.000.
- b. DIPA tanggal 31 Oktober 2014 sebesar Rp81.500.000.000, terdiri dari:
- 1) Disperindagkop Kabupaten Demak sebesar Rp5.000.000.000
 - 2) Disperindag Kabupaten Brebes sebesar Rp3.000.000.000
 - 3) Disperindag Kota Surakarta sebesar Rp5.000.000.000
 - 4) Disperindag Kabupaten Bondowoso sebesar Rp5.000.000.000
 - 5) Disperindag Kota Malang sebesar Rp5.000.000.000
 - 6) Disperindag Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp4.000.000.000
 - 7) Disperindagkop Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar Rp5.000.000.000
 - 8) Disperindag Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar Rp5.000.000.000
 - 9) Disperindag Kabupaten Sarolangun sebesar Rp5.000.000.000
 - 10) Disdag dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Wajo sebesar Rp5.000.000.000
 - 11) Diskopdag dan Usaha Kecil Kota Pare-Pare sebesar Rp7.500.000.000
 - 12) Disperindag Kabupaten Gowa sebesar Rp5.000.000.000
 - 13) Diskop UMKM Dag Intam dan Energi Kabupaten Bulukumba sebesar Rp7.000.000.000
 - 14) Disdag Intam dan Energi Kabupaten Bantaeng sebesar Rp5.000.000.000
 - 15) Diskop UMKM Perindag Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar Rp5.000.000.000
 - 16) Diskop UKM Perindag Kabupaten Gorontalo sebesar Rp5.000.000.000.
5. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) sebagai salah satu Satuan Kerja dan Eselon-I di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mempunyai Aset berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, maupun Gedung dan Bangunan yang berasal dari Tugas Pembantuan (TP) dan Dana Dekonsentrasi (DK) yang tidak berhubungan lagi secara

Keuangan (Satker Likuidasi) di mana terdapat 45 SKPD Tugas Pembantuan (TP) yang pengadaannya sebelum Tahun Anggaran 2011. Bappebti mengajukan usulan hibah melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan untuk diajukan ke Kementerian Keuangan sebelum batas waktu yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 tentang pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari Dana Dekonsentrasi (DK) dan Dana Tugas Pembantuan (TP) sebelum Tahun Anggaran 2011 yaitu paling lambat tanggal 31 Desember 2014. Adapun progress/perkembangan dari usulan pengajuan hibah dari BAPPEBTI ke Kementerian Keuangan melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan sampai dengan laporan ini disusun terdapat 8 SKPD yang telah mendapat Persetujuan dari Pengelola Barang, 36 SKPD yang telah dikirim usulan Hibahnya ke Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan, dan 1 SKPD yang masih belum lengkap persyaratannya mengingat SKPD yang bersangkutan mempunyai Peraturan terkait dengan Pengelolaan Aset tersendiri di daerahnya sehingga hingga batas waktu yang ditetapkan untuk mengajukan usulan ke Pengelola Barang belum dapat dilaksanakan hingga Laporan Keuangan ini disusun. Selanjutnya dari 8 SKPD yang telah mendapatkan persetujuan, BAPPEBTI menunggu diterbitkan Surat Keputusan dari Pengguna Barang untuk pelaksanaan serah terima dan penghapusan Barang Milik Negara tersebut.

6. Terdapat kasus Tuntutan Ganti Rugi (TGR) senilai Rp1.390.297.325,65 dalam proses penetapan dan belum dilakukan penyetoran sama sekali. Kasus tersebut berupa tuntutan perbendaharaan atas nama Ir. R. Soegeng Pangestu pada satker Ditjen Perdagangan Luar Negeri sebesar DM 227,436.63 atau setara dengan Rp1.390.297.325,65 yang terjadi pada TA 1994/1995, yang dalam Laporan Penyelesaian Kerugian Negara Kementerian Perdagangan Semester II Tahun 2012 disebutkan bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia dan ahli warisnya tidak diketahui keberadaannya.